



Pemerintah Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta

RANCANGAN AKHIR
PERUBAHAN
RENSTRA
RENCANA STRATEGIS
2022-2027

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

jogja
istimewa

**PEMERINTAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



**RANCANGAN AKHIR
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN 2022 - 2027**

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
2025**

KATA PENGANTAR

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis (Renstra) DLHK DIY Tahun 2022 - 2027 telah dapat diselesaikan. Rancangan Akhir Perubahan Renstra DLHK DIY Tahun 2022 - 2027 ini disusun dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sehingga diperlukan beberapa penyesuaian kegiatan dan/atau subkegiatan yang tercantum dalam dokumen Renstra OPD.

Kami menyadari, bahwa penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renstra DLHK DIY Tahun 2022 - 2027 ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu diharapkan adanya masukan yang konstruktif bagi perbaikan di masa mendatang. Kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renstra DLHK DIY Tahun 2022 - 2027 ini kami sampaikan terima kasih.

Yogyakarta, 13 Januari 2025

**Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan DIY**



Kusno Wibowo, S.T., M.Si.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1	1
1.2	3
1.3	5
a.	5
b.	5
1.4	6
BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	7
2.1	7
2.2	9
2.3	13
2.1	20
BAB 3 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	23
3.1	23
A.	24
B.	28
3.2	35
3.3	36
a.	36
b.	40
3.4	42
3.5	50
BAB 4 TUJUAN DAN SASARAN	56
4.1	56
4.2	56
BAB 5 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	59
5.1	59

5.2	59
BAB 6 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN	63
BAB 7 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	156
BAB 8 PENUTUP	159
8.1	166
8.2	166
8.3	167

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Profil kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY	9
Tabel 2 Sarana-Prasarana	10
Tabel 3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta Periode Renstra 2017 - 2022	13
Tabel 4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta Periode Renstra 2022 - 2027	14
Tabel 5 Analisis Tantangan dan Peluang	20
Tabel 6 Status kualitas air sungai DIY Tahun 2022	26
Tabel 8 Penanganan lahan kritis 2018 - 2022	29
Tabel 9 Kawasan Konservasi di DIY	30
Tabel 10 Identifikasi Permasalahan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	32
Tabel 11 Faktor - faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY Ditinjau dari Sasaran Jangka Menengah Renstra KLHK	38
Tabel 12 Analisis TPB yang diampu DLHK DIY dalam KLHS	45
Tabel 13 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	57
Tabel 14 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan	61
Tabel 15 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah DLHK DIY Tahun 2022 - 2027	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Posisi Renstra Perangkat Daerah Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	3
Gambar 2 Struktur Organisasi DLHK DIY	9
Gambar 3 Data capaian IKTL DIY 2018 - 2022	28

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

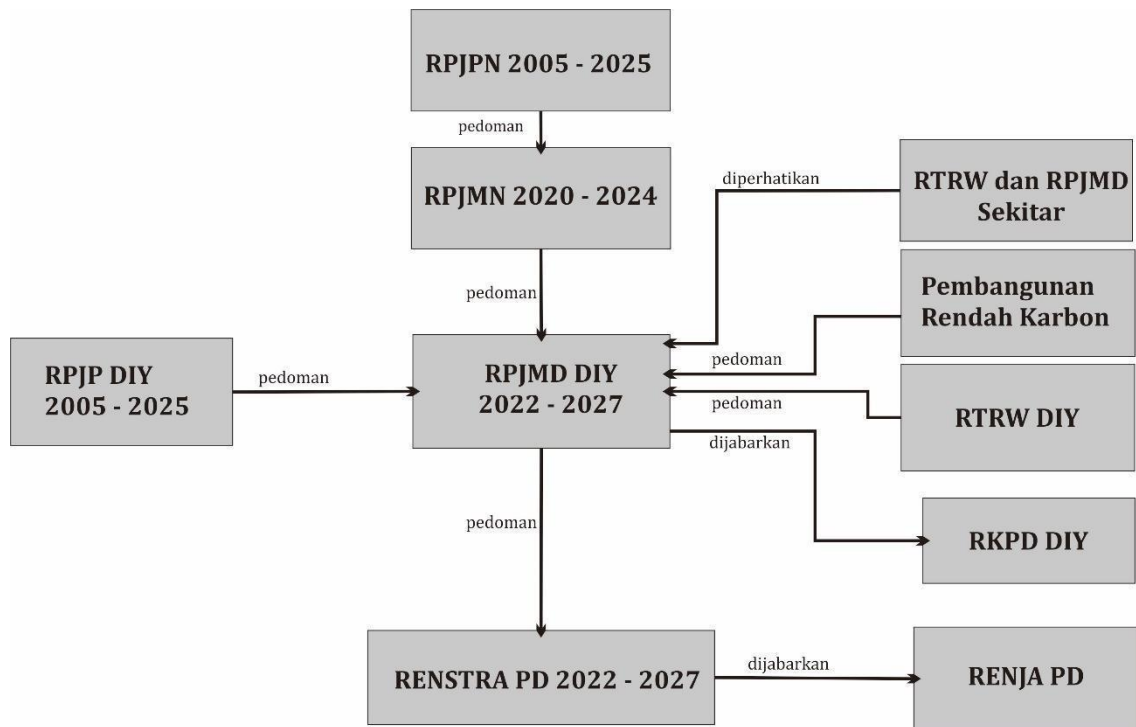
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana strategis sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Dokumen Renstra mencakup tujuan, sasaran, program, kegiatan, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang akan dicapai dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan di DIY. Menindaklanjuti Peraturan Daerah Istimewa DIY Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta serta dalam rangka penyesuaian kegiatan dan/atau sub kegiatan yang tercantum dalam RKPD DIY Tahun 2025 serta nomenklatur Program/Kegiatan/Subkegiatan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka perlu disusun Perubahan Renstra. Penyusunan Perubahan Renstra DLHK DIY berpedoman pada Bagian Keenam Paragraf 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Dalam penyusunan Perubahan Renstra ini dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelarasan program prioritas nasional dalam RPJPN Tahun 2005 – 2025 dan RPJMN Tahun 2020-2024;
2. Penyelarasan program prioritas daerah dalam RPJPD DIY Tahun 2005 – 2025 dan RPJMD Tahun 2022-2027;
3. Evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil (outcome) Perubahan Renstra PD masing-masing melalui evaluasi capaian RKPD atau Renja PD sampai dengan tahun 2024;
4. Evaluasi kontribusi keluaran (output) dari seluruh kegiatan/ subkegiatan sampai dengan tahun 2024 dalam pencapaian hasil (outcome);
5. Isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) perangkat daerah;
6. Kebijakan nasional
7. Regulasi yang berlaku
8. Saran dan/ atau masukan dari pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan daerah;

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022-2027 memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan serta rencana pendanaan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2022 - 2027 dan bersifat indikatif. Selanjutnya Perubahan Renstra Perangkat Daerah disempurnakan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Gubernur Perubahan Renstra Perangkat Daerah yang kemudian menjadi pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah. Alur proses penyusunan dokumen perencanaan dan posisi Renstra dalam perencanaan pembangunan daerah dapat dilihat pada bagan alir berikut:



Gambar 1 Posisi Renstra Perangkat Daerah Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Perubahan Renstra DLHK DIY Tahun 2022-2027, peraturan perundangan yang digunakan sebagai rujukan adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- 4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 5) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
- 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

- 8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 9) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- 10) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
- 11) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Awal Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- 16) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 17) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 18) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 - 2025;
- 19) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 – 2039;
- 20) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2022 – 2027;
- 21) Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
- 22) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender;
- 23) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 24) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2023 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renstra DLHK DIY Tahun 2022-2027 adalah untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

b. Tujuan

Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renstra DLHK DIY Tahun 2022 - 2027 bertujuan:

- 1) Mengakomodir dinamika yang terjadi dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah termasuk penyesuaian nomenklatur Perencanaan Pembangunan
- 2) Terwujudnya perencanaan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan urusan pemerintahan bidang kehutanan yang menjadi tugas, pokok dan fungsi DLHK DIY yang berkualitas, kolaboratif, dan akuntabel
- 3) Terwujudnya koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan baik antar unit kerja dalam OPD, antar OPD, antara Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat
- 4) Tersedianya tolak ukur untuk mengukur kinerja dan evaluasi kinerja di lingkup DLHK DIY

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rancangan Akhir Perubahan Renstra DLHK DIY Tahun 2022-2027:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat Latar Belakang serta Maksud, Tujuan dan Dasar Penyusunan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat gambaran umum pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat hasil analisis permasalahan dan hasil analisis isu strategis dalam upaya pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Memuat rumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat yang menjadi Kewenangan Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat rumusan strategi dan arah kebijakan di dalam mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat rencana program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja serta kebutuhan pendanaan

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat kinerja penyelenggaraan Bidang Urusan Pemerintahan periode berikutnya

BAB VIII PENUTUP

BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Pembentukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta (DLHK DIY) merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang mengamanatkan kepada setiap pemerintah daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, mencakup lingkungan hidup dan urusan pemerintahan pilihan yang mencakup kehutanan. Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY terakhir diatur dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kelembagaan DLHK DIY diatur dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 111 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. DLHK DIY memiliki Unit Pelayanan Teknis (UPT) yang kelembagaannya diatur dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2023 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Untuk menyelaraskan dengan kebijakan pemerintah pusat terkait penyederhanaan birokrasi maka dilakukan penataan kelembagaan melalui Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 111 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

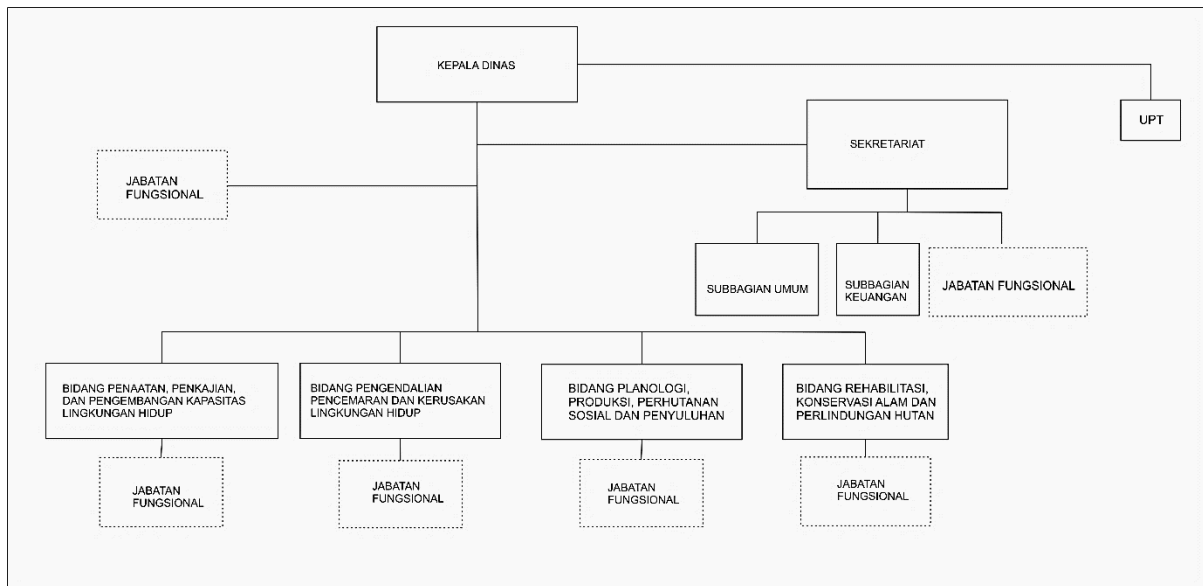
Kedudukan DLHK DIY sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan daerah provinsi adalah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dan dipimpin oleh Kepala Dinas. Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan urusan pemerintahan bidang kehutanan. Untuk melaksanakan tugasnya DLHK DIY mempunyai fungsi dalam:

1. penyusunan program kerja Dinas;
2. perumusan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup dan kehutanan;

3. penyelenggaraan penataan, pengkajian, dan pengembangan kapasitas lingkungan hidup;
4. penyelenggaraan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
5. penyelenggaraan planologi dan produksi hutan;
6. penyelenggaraan rehabilitasi dan konservasi alam;
7. pengelolaan persampahan;
8. pengelolaan laboratorium lingkungan;
9. pengelolaan perbenihan kehutanan;
10. pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung;
11. pengelolaan Taman Hutan Raya Bunder;
12. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan;
13. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
14. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
15. pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan kabupaten/kota; dan
16. fasilitasi pembinaan reformasi birokrasi Dinas
17. fasilitasi penyusunan kebijakan proses bisnis Dinas
18. pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik lingkup Dinas
19. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup dan kehutanan
20. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 111 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, struktur organisasi DLHK DIY yaitu Kepala Dinas membawahi 1 Sekretariat, 4 Bidang, 5 Balai, serta 6 jenis jabatan fungsional tertentu. Struktur tersebut telah sesuai

dengan kebutuhan organisasi. Masing – masing menerima mandat kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Secara lebih jelasnya struktur organisasi DLHK DIY dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Sumber: Pergub No.100 Tahun 2024

Gambar 2 Struktur Organisasi DLHK DIY

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dukungan SDM DLHK DIY secara total per 01 Januari 2024¹ adalah 395 orang. Secara terperinci profil kepegawaian (PNS) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY adalah sebagai berikut.

Tabel 1 Profil kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY

NO	UNIT KERJA	PNS	P3K ASN	P3K DIY	JUMLAH
1	Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan	76	3	48	127
2	Balai Laboratorium Lingkungan	14	0	5	19
3	Balai Pengelolaan Sampah	13	0	1	14
4	Balai Tahura	17	7	10	34
5	Balai Perbenihan Kehutanan	12	0	3	15
6	Dinas Induk	83	15	17	115
	JUMLAH	215	25	84	324

Sumber : Data Kepegawaian DLHK DIY (2024)

Dukungan SDM Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY secara total 324 orang, terdiri dari 215 orang PNS, 25 orang P3K ASN, 84 orang P3K DIY. Perbandingan

¹ Berdasarkan data internal Subbag Umum DLHK DIY

jumlah pejabat struktural berjenis kelamin laki – laki dibanding perempuan relatif seimbang dengan rasio sebesar 17:11, sebagian besar jabatan struktural terisi penuh. Dari aspek kualifikasi pendidikan masih terdapat pegawai yang belum memenuhi kualifikasi, namun karena faktor pengalaman kerja mereka memiliki kompetensi dalam jabatan yang diduduki sehingga tetap dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY. Secara terperinci profil kepegawaian DLHK DIY adalah sebagai berikut.

Total SDM di dinas induk sebanyak 115 orang, terdiri dari PNS 83 orang, P3K ASN 15 orang, P3K DIY 17 orang. Proporsi gender di dinas induk relatif seimbang dengan jumlah pegawai laki – laki orang (60,08 %) sedikit lebih banyak dibanding pegawai perempuan 101 orang (39,92 %). Di luar tenaga outsourcing, sebagian besar pegawai dinas induk berpendidikan SMA (130 orang, 38,69 %), diikuti dengan S1 (123 orang, 36,61 %), S2 (48 orang, 14,29 %), DIII (23 orang, 6,85 %), dan paling sedikit di bawah SMA (12 orang, 3,57 %).

Sebagai satu – satunya unit organisasi di bawah DLHK DIY yang memegang KPA, Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta (Balai KPH Yogyakarta) memiliki proporsi SDM yang cukup besar karena harus mengawasi dan mengelola hutan negara seluas 15.581 ha.² Total SDM di Balai KPH Yogyakarta sebanyak 127 orang, pegawai berstatus PNS berjumlah 76 orang, P3K ASN 3 orang, P3K DIY 48 orang. Dari keseluruhan pegawai, pegawai laki – laki Balai KPH Yogyakarta sangat mendominasi dengan jumlah sebanyak 126 orang (88,73%) jika dibandingkan dengan pegawai perempuan sebanyak 16 orang (11,27 %). Sebagian besar SDM di Balai KPH Yogyakarta memiliki tingkat pendidikan SMA/Sederajat (43 orang, 53,75 %), diikuti oleh S1 (25 orang, 31,25 %), di bawah SMA (7 orang, 8,75 %), S2 (3 orang, 3,75 %), dan paling sedikit DIII 2 orang (2,5%).

Dukungan sarana dan prasarana secara total per 31 Desember 2023 adalah Rp.222.148.302.568,92. Adapun rekapitulasi data sarana dan prasarana secara terperinci adalah sebagai berikut.

Tabel 2 Sarana-Prasarana

No	Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Nama barang	Jumlah barang	Jumlah harga (rp)
1	1	3			Aset tetap	7.492	217.501.707.393,92
			1		Tanah	55	42.819.470.972,00
			1	1	Tanah	55	42.819.470.972,00
			2		Peralatan dan mesin	3.301	66.952.554.098,92
			2	1	Alat besar	91	36.604.315.050,00

²Berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 122 Tahun 2018 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Yogyakarta

No	Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Nama barang	Jumlah barang	Jumlah harga (rp)
			2	2	Alat angkutan	213	6.945.877.798,40
			2	3	Alat bengkel dan alat ukur	147	933.468.828,52
			2	4	Alat pertanian	21	118.361.232,00
			2	5	Alat kantor dan rumah tangga	1.719	5.784.409.010,00
			2	6	Alat studio, komunikasi dan pemancar	249	1.561.858.363,00
			2	7	Alat kedokteran dan kesehatan	7	14.150.000,00
			2	8	Alat laboratorium	398	11.916.384.740,00
			2	9	Alat persenjataan	19	30.745.550,00
			2	10	Komputer	404	2.681.328.277,00
			2	11	Alat eksplorasi	4	13.392.000,00
			2	12	Alat pengeboran	0	0
			2	13	Alat produksi, pengolahan dan pemurnian	4	172.000.000,00
			2	14	Alat bantu eksplorasi	1	10.705.000,00
			2	15	Alat keselamatan kerja	12	8.400.000,00
			2	16	Alat peraga	0	0
			2	17	Peralatan proses/produksi	2	128.000.000,00
			2	18	Rambu - rambu	0	0
			2	19	Peralatan olah raga	10	29.158.250,00
			3		Gedung dan bangunan	170	64.299.642.680,00
			3	1	Bangunan gedung	167	63.985.682.800,00
			3	2	Monumen	2	269.348.000,00
			3	3	Bangunan menara	0	0
			3	4	Tugu titik kontrol/pasti	1	44.611.880,00
			4		Jalan, jaringan dan irigasi	144	35.479.684.456,00
			4	1	Jalan dan jembatan	55	15.239.585.350,00
			4	2	Bangunan air	40	17.739.771.491,00
			4	3	Instalasi	27	1.767.713.935,00
			4	4	Jaringan	22	732.613.680,00
			5		Aset tetap lainnya	3.810	5.283.982.587,00
			5	1	Bahan perpustakaan	3.799	215.227.501,00
			5	2	Barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga	0	0
			5	3	Hewan	0	0
			5	4	Biota perairan	0	0
			5	5	Tanaman	7	1.009.868.486,00
			5	6	Barang koleksi non budaya	0	0
			5	7	Aset tetap dalam renovasi	4	4.058.886.600,00
			6		Konstruksi dalam pengerjaan	12	2.666.372.600,00
			6	1	Konstruksi dalam pengerjaan	12	2.666.372.600,00
			7		Akumulasi penyusutan	0	0
			7	1	Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin	0	0
			7	2	Akumulasi penyusutan gedung dan bangunan	0	0
			7	3	Akumulasi penyusutan jalan, jaringan dan irigasi	0	0
			7	4	Akumulasi penyusutan aset tetap lainnya	0	0
2	1	5			Aset lainnya	29	4.646.595.175,00
			2		Kemitraan dengan pihak ketiga	0	0
			2	1	Kemitraan dengan pihak ketiga	0	0
			3		Aset tidak berwujud	12	3.996.135.250,00
			3	1	Aset tidak berwujud	12	3.996.135.250,00
			4		Aset lain-lain	17	650.459.925,00
			4	1	Aset lain-lain	17	650.459.925,00
					Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud	0	0
			5	1	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud	0	0
			6		Akumulasi penyusutan aset lainnya	0	0
			6	1	Akumulasi penyusutan aset lainnya	0	0
					Total	7.521	222.148.302.568,92

Sumber: Data Neraca Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 31 Desember 2023 (Unaudited)

*Nilai aset belum memperhitungkan penyusutan di tahun 2023

Kendaraan dinas terdiri dari yakni:

1. Dinas induk memiliki 1 (satu) unit kendaraan roda enam, 16 (enam belas) unit kendaraan roda empat, 3 (tiga) unit kendaraan roda tiga, 72 (tujuh puluh dua) unit kendaraan roda dua dan 1 (satu) unit kendaraan roda dua listrik.
2. Balai KPH Yogyakarta memiliki 4 (empat) unit kendaraan roda empat, 74 (tujuh puluh empat) unit kendaraan roda dua

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang terdiri dari gedung dinas maupun Gedung UPTD. Kebutuhan ruangan kantor secara umum tersedia karena masing – masing balai/bidang/seksi/subbagian sudah menempati kantor/ruang masing – masing. Kantor dinas dilengkapi dengan fasilitas 7 (tujuh) aula, ruang arsip, perpustakaan, mushola, gudang, ruang tamu, ruang laktasi, ruang ramah anak. Juga terdapat toilet ramah gender di masing – masing bidang/balai. Selain itu Dinas juga memiliki dua pabrik minyak kayu putih, 5 kantor BDH, kantor RPH dan laboratorium lingkungan. Adapun perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, *filling cabinet*, pendingin ruangan, alat pemadam kebakaran dan lain-lain sudah tersedia dalam kondisi baik. Rasio *Personal Computer dan/atau laptop* dibanding jumlah pegawai yang ada di kantor induk mendekati 1 : 1. Dengan demikian ketersediaan sarana dan prasarana sudah memadai.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Adapun tingkat capaian kinerja pelayanan DLHK DIY pada periode 2017 - 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta Periode Renstra 2017 - 2022

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang lingkungan hidup	n/a	n/a	n/a	88,56 %	91,47 %	94,39 %	97,02 %	100 %	93,26	92,29 %	98,65 %	97,02 %	90,58 %	1,05	1,008	0,98	0,97	0,90
2.	Nilai subsektor kehutanan dalam PDRB	n/a	n/a	n/a	734.713 juta rupiah	742.060 juta rupiah	749.480 juta rupiah	756.975 juta rupiah	764.545 juta rupiah	102.026 juta rupiah	108.696,1 juta rupiah	955.42 juta rupiah	1.004.249,7 juta rupiah	891,29 juta rupiah	1,388	1,46	1,287	1,334	1,16

Sementara itu, tingkat capaian kinerja pelayanan DLHK DIY pada periode 2022 - 2027 adalah sebagai berikut.

Tabel 4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta Periode Renstra 2022 - 2027

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	n/a	n/a	n/a	BB (80)	A(88,98)	A(88,99)	A(89,00)	A(89,01)	A(89,97)	A*)	n/a	n/a	n/a	1,00	1,00*)	n/a	n/a	n/a
2.	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Provinsi	n/a	n/a	n/a	24,44 %	25%	25,34%	25,66 %	26,58 %	27,7%	27,14*)	n/a	n/a	n/a	1,00	1,08*)	n/a	n/a	n/a
3.	Nilai indeks pencemaran sungai lintas kab/kota	n/a	n/a	n/a	6	6,11	6,03	5,94	5,86	6,52	5,49*)	n/a	n/a	n/a	0,9	1,10*)	n/a	n/a	n/a
4.	Peningkatan jumlah produksi sektor kehutanan	n/a	n/a	n/a	5%	5%	5%	5%	5%	5%	12,29%*)	n/a	n/a	n/a	1,00	2,45*)	n/a	n/a	n/a
5.	Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi di DIY	n/a	n/a	n/a	2,52 %	3,15%	4,61%	4,82 %	5,87 %	2,52%	4,48%*)	n/a	n/a	n/a	1,00	1,42*)	n/a	n/a	n/a

*) Angka Sementara

Pada periode RPJMD 2022 – 2027 terdapat 3 sasaran strategis dengan 5 indikator. Berikut analisis ketercapaian masing – masing indikator sasaran strategis tersebut.

1. Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah

Berdasarkan penilaian yang dilaksanakan oleh Tim Evaluasi Reformasi Birokrasi Pemda DIY DLHK DIY memperoleh capaian nilai RB sebagai berikut:

Tabel 3 Rekapitulasi Nilai RB DLHK DIY Tahun 2023

No.	Unit Kerja	RB General	RB Tematik	Nilai RB 2023	Kategori	Predikat	Nilai RB 2022	Nilai RB 2021
1.	DLHK DIY	83,22	5,75	88,97	A	Memuaskan	83,32	80,35
	Rata – rata OPD DIY	84,24	5,66	89,90	A	Memuaskan	82,87	80,02

Penilaian RB OPD dihitung dari akumulasi nilai RB General dan RB Tematik OPD. Penilaian RB General berkaitan dengan upaya OPD dalam melakukan perbaikan yang berfokus pada penyelesaian isu hulu yaitu masalah tata kelola pemerintahan yang terjadi di internal birokrasi, sementara penilaian RB Tematik lebih menitikberatkan pada upaya OPD dalam mendorong penyelesaian isu hilir yaitu masalah yang muncul di masyarakat dan terkait dengan agenda prioritas Pembangunan Nasional yang umumnya terjadi sebagai turunan yang muncul apabila isu strategis hulu tidak terselesaikan.

DLHK DIY memperoleh nilai RB sedikit di bawah nilai RB rata – rata OPD DIY sebesar 89,90. Meskipun demikian, nilai total 89,97 tersebut masuk ke dalam kategori A, melampaui target yang ditetapkan pada tahun 2023 untuk DLHK DIY yaitu BB. Hal tersebut adalah sebuah prestasi yang menggembirakan, apalagi jika mempertimbangkan peningkatan nilai RB Dinas yang berturut - turut dari awalnya 80,35 pada tahun 2021 kemudian 83,32 lalu meningkat secara signifikan hingga mencapai 89,97 pada 2023. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa peningkatan nilai RB Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY turut mendorong pencapaian nilai RB Pemda DIY yang menjadi indikator sasaran Pemda DIY. Pada tahun 2024, DLHK DIY ditargetkan mencapai nilai RB (88,98) dengan kategori A. Tren peningkatan nilai RB

DLHK DIY menunjukkan bahwa DLHK DIY berada pada jalur yang positif dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, didukung oleh kebijakan strategis dan implementasi program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang lebih baik.

2. Tercapainya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Indikator sasaran pertama yaitu Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Provinsi. Indikator tersebut diperoleh dari Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang taat dibandingkan dengan jumlah pengawasan yang dilakukan di tahun 2023. Untuk tahun 2023, capaian kinerjanya sebesar 27,7%. Jika dibandingkan dengan angka tahun lalu, pada tahun 2024 ini terjadi peningkatan capaian kinerja karena jumlah perusahaan yang tidak taat semakin menurun. Capaian kinerja tahun 2024 diproyeksikan sebesar 27,14 %. Sampai dengan TW III telah dilakukan pengawasan terhadap 118 usaha/kegiatan. Pelaksanaan pengawasan ini dilakukan dengan metode langsung sebanyak 46 usaha/ kegiatan dan pengawasan tidak langsung sebanyak 72 usaha/ kegiatan. Sampai dengan TW III terdapat penambahan 29 Usaha/ Kegiatan yang taat dan masih ada 22 usaha/kegiatan yang akan diawasi sampai dengan akhir tahun. Ketika menjalankan tugasnya dalam melakukan penilaian, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup tunduk pada SOP Pengawasan Penuaan Perizinan dan Peraturan Perundang – undangan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diterbitkan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, KLHK RI.

Indikator sasaran kedua yaitu Nilai indeks pencemaran sungai lintas kab/kota. Indeks Pencemar (IP) dihitung berdasarkan hasil pemantauan kualitas air sungai yang dilakukan oleh DLHK DIY di 11 Sungai dengan jumlah titik pantau sebanyak 50 titik pantau. Parameter yang diuji sebanyak 8 parameter meliputi TSS, BOD, COD, Total Phospat, Nitrat, pH, DO, dan Fecal Coli. Pada tahun 2023, realisasi nilai indeks pencemaran sungai sebesar 6,52. Ketidaktercapaian target ini kemungkinan disebabkan oleh limbah domestik rumah tangga dan limbah non point source (limbah dari drainase, ternak, pertanian, dll) yang langsung masuk ke sungai tanpa melalui proses pengolahan serta masih kurang optimalnya IPAL Komunal yang ada sehingga masih mencemari sungai.

Pada tahun 2024, upaya untuk menurunkan IP sungai semakin giat dilakukan. Sampai dengan TW IV Tahun 2024, indeks pencemaran sungai berada di angka 5,49 yang merupakan rerata IP periode 1 + 2 + 3 = 5,99 + 5,28 + 5,20 = 5,49. Berdasarkan hasil uji yang dilakukan, parameter dominan yang masih melebihi baku mutu adalah Total Fosfat dan Fecal Coli. Masih terdapat parameter dengan status cemar berat yaitu sungai code 4 untuk parameter fosfat dan coli. Perhitungan IP dilakukan sebanyak 3 periode yang mewakili musim hujan, kemarau, dan peralihan di sungai yang lintas kabupaten/ kota di DIY. Perhitungan ini menggunakan 8 parameter yaitu PH, DO, TSS, BOD, COD, Total Fosfat, Fecal Coli, dan Nitrat. Pengambilan contoh uji dilakukan di 50 titik pada tiap periodenya. Dasar pelaksanaan pengambilan sampel uji adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Limbah domestik masih menjadi faktor yang paling dominan dalam pencemaran air sungai. Hal ini terbukti dari masih tingginya parameter koli dan fosfat yang ada. pengelolaan limbah rumah tangganya dan tingginya curah hujan juga berpengaruh kepada limpasan polutan sumber pencemar dari drainase, pertanian, domestik, peternakan, dsb yang masuk ke sungai. Di sisi lain, dengan semakin ketatnya penertiban pembuangan sampah liar dan upaya evakuasi sampah di bantaran sungai oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, secara visual timbulan sampah yang ada di sungai cukup berkurang jika dibandingkan saat awal kebijakan desentralisasi desentralisasi pengelolaan sampah diterapkan.

3. Terwujudnya pengelolaan hutan lestari

Pada tahun 2023, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menginisiasi perhitungan Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) oleh Kelompok Tani Hutan. Berdasarkan pendekatan yang dilakukan, terdapat nilai transaksi sebesar Rp. 5.234.184.920,- untuk produk-produk kehutanan di DIY sepanjang tahun 2023. Nilai transaksi terbesar ada di Kabupaten Kulon Progo yaitu sebesar Rp. 3.116.456.920,- dengan komoditas penyumbang terbanyak berupa produk olahan tanaman obat senilai Rp. 1.608.677.320,-.

Indikator kinerja ini dihitung melalui perhitungan angka produksi yang berasal dari luar kawasan dan dalam kawasan. Perhitungan luar kawasan dilakukan melalui pendekatan Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) yang ada di aplikasi Simluh. Realisasi NTE

sampai dengan TW III Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 5.495.894.166,-. Sedangkan perhitungan untuk nilai transaksi ekonomi yang berasal dari aktivitas perhutanan sosial telah terealisasi sebesar Rp. 3.983.175.000,-. Angka produksi ini paling banyak berasal dari usaha silvopastoral (usaha kehutanan dan peternakan, misalnya penanaman hijauan tanaman ternak di bawah tegakan), jasa lingkungan, dan nilai ekonomi tanaman pangan. Angka produksi hasil hutan yang berasal dari dalam kawasan hingga TW III ini sebesar Rp. 4.006.657.541,- yang berasal dari Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah (minyak kayu putih, kayu) sebesar Rp. 2.915.955.166,- dan Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD (Contoh: Mangunan) sebesar Rp. 1.090.702.375,-. Dengan demikian maka angka total untuk nilai produksi kehutanan di DIY sampai dengan TW III adalah sebesar Rp. 13.485.726.707,-. Potensi yang luar biasa ini akan terus dikembangkan melalui identifikasi potensi yang ada agar akselerasi peningkatan nilai produksi kehutanan di DIY dapat dilakukan, tentunya dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan.

Selain dari sisi ekonomi, keterwujudan pengelolaan hutan lestari juga perlu mempertimbangkan sisi lingkungan sehingga sebagai indikator kedua digunakan indikator persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi di DIY. Formulasinya adalah jumlah penanganan lahan kritis sampai dengan tahun n /jumlah sasaran lahan kritis dikali 100%. Data lahan kritis di DIY berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Dan Rehabilitasi Hutan Nomor SK.49/PDASRH/PPPDAS/DAS.0/12/2022 tentang Penetapan Peta Dan Data Lahan Kritis Nasional Tahun 2022 adalah seluas 79.123 ha. Selanjutnya dipilih kategori "kritis" dan "sangat kritis" untuk dijadikan skala prioritas penanganan. Selain itu penggunaan lahan selain hutan juga dikeluarkan dari sasaran prioritas. Dengan analisis tersebut maka diperoleh luasan sebesar 35902,62 ha yang akan menjadi prioritas penanganan rehabilitasi hutan dan lahan Realisasi penanganan lahan kritis hingga tahun 2023 adalah seluas 1236,42 ha sehingga persentasenya sebesar 2,52%.

Pada tahun 2024, target menjadi 3,15 % dengan realisasi diproyeksikan mencapai 4,48%. Kegiatan Rehabilitasi Hutan Lahan (RHL) dengan sumber pembiayaan dari APBD sepanjang tahun 2024 adalah sebagai berikut : 1. Kegiatan penghijauan lingkungan seluas 1 ha yang berlokasi di Dusun Berbah, Kalurahan Kalitirto,

Kapanewon Berbah, Kabupaten Sleman. Jumlah bibit yang ditanam sebanyak 60 batang dengan jenis jambu air sebanyak 50 batang dan kelengkeng 10 batang.

2. Kegiatan pelestarian mata air seluas 5 ha yang berlokasi di Mata Air Ngepring, Kemiri, Purwobinangun, Pakem, Sleman. Jenis tanamannya adalah aren (425 batang), Ficus SP (230 batang), gayam (300 batang), kemiri (170 batang), duwet (400 batang), petai (400 batang), dan sirsak (75 batang).

3. Pembangunan gully plug sebanyak 5 unit yang berlokasi di : - KTH Margo Tani, Ngalang, Gedangsari, Gunungkidul (1 unit) - KTHR Tani Rejo, Seloharjo, Pundong, Bantul (2 unit) - KTH Sumber Rejeki, Ngalang, Gedangsari, Gunungkidul (1 unit) - KTH Umbul Makmur, Sumberharjo, Prambanan, Sleman (1 unit)

4. Pembuatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) melalui dana APBD sebanyak 2 unit dengan total luasan yang direhabilitasi sebesar 200 ha. Lokasi KBR dimaksud adalah : - KTH Sedyo Nurut, Giriharjo, Panggang, Gunungkidul - KTH Wana Lestari, Bleberan, Playen, Gunungkidul

Kegiatan RHL yang bersumber Dana Keistimewaan Urusan Tata Ruang adalah :

1. Realisasi penanaman di Satuan Ruang Strategis pada tahun 2024 seluas 10 ha di Satuan Ruang Strategis Merapi tepatnya di Padukuhan Karang Kendal dan Gunung Wulung Kalurahan Umbulharjo, Kapanewon Cangkringan Kabupaten Sleman

Selain kegiatan yang bersumberdana dari APBD, kegiatan RHL juga didukung oleh APBN dengan perincian sebagai berikut :

1. Pembuatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) di 2 lokasi yaitu : - KTH Sido Maju, Widoro Giripurwo Purwosari Gunungkidul (sengon : 25.000 btg, alpukat: 10.000 btg) dengan luas tanam 75 ha - KTH Marsudi Raharjo, Sumberwungu, Tepus, Gunungkidul (Sengon : 30.000 btg, petai : 5.000 btg) dengan luas tanam 72 ha

Realisasi '= jumlah penanganan lahan kritis sampai dengan tahun N /jumlah sasaran lahan kritis*100% '= $(1236,42 + (1+5+15+200) + 10 + (75+72)) / 35902,62 * 100\% '= 4,48 \%$

Pada tahun 2024, RHL juga dilakukan di dalam kawasan dengan menggunakan alokasi anggaran APBN dengan perincian sebagai berikut :

1. RHL di dalam kawasan hutan konservasi Tahura Bunder : - P0 : 72 ha Kegiatan persiapan, penanaman, dan pemeliharaan tahun berjalan dan 58 ha persiapan penanaman - P1 : 143 ha kegiatan pemeliharaan tahun pertama (penyiangan, pendangiran, pemberian mulsa, pemupukan, dll) - P2 : 100 ha kegiatan pemeliharaan tahun kedua (penyiangan, pendangiran, pemberian mulsa, pemupukan, dll)

2. RHL di dalam kawasan hutan produksi seluas 195 ha dengan perincian : - BDH Playen 78 ha - BDH Paliyan 20 ha - BDH Karangmojo 57 ha - BDH Panggang 30 ha - BDH Kulon Progo-Bantul 10 ha.

Gerakan RHL yang dilakukan selama ini masih tidak sebanding dengan alih fungsi lahan yang

terjadi sehingga masih dibutuhkan tambahan sumberdaya anggaran untuk mengakselerasi kegiatan RHL sehingga gap antara target dengan realisasi bisa diperkecil. Keterlibatan lintas sektor juga perlu semakin digalakkan, khususnya UPT Kementerian Kehutanan yang ada di DIY agar dapat mengakselerasi penanganan lahan kritis di DIY secara signifikan.

2.1 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel 5 Analisis Tantangan dan Peluang

Tantangan	Peluang
Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	
<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya kerusakan dan pencemaran lingkungan akibat aktivitas pertambangan dan industri yang tidak ramah lingkungan b. Alih peruntukan dan penggunaan lahan yang menyebabkan ruang terbuka hijau semakin berkurang dan berkurangnya daerah resapan air c. Ancaman kerusakan kawasan hutan keanekaragaman hayati akibat peningkatan aktifitas pariwisata yang tidak ramah lingkungan d. Kondisi geografis DIY yang rentan terhadap bencana. e. Adanya dampak perubahan iklim yang serius ditandai dengan meningkatnya suhu lingkungan, meningkatnya permukaan air laut, dan meningkatnya emisi gas rumah kaca f. Masih lemahnya komitmen para Pemangku Kepentingan dalam pelestarian fungsi lingkungan g. PermenLHK Nomor 1 Tahun 2021 mensyaratkan untuk ketaatan aspek pengendalian pencemaran air 100% menjadi tantangan tersendiri karena sulitnya usaha dan/atau kegiatan untuk membuat sistem pembuangan air limbah yang memadai h. Penurunan kualitas dan kuantitas air tanah i. Penurunan indeks kualitas udara karena meningkatnya polusi udara karena emisi karbon dari peningkatan penggunaan kendaraan bermotor. j. Pengelolaan sampah dan limbah yang masih dilakukan secara konvensional. Belum adanya pemanfaatan teknologi untuk pengolahan sampah. k. Penanganan dan pemulihan pasca Pandemi Covid-19 serta transisi menuju 	<ul style="list-style-type: none"> a. Permen LH Nomor 5 Tahun 2011 melalui pelaksanaan program penilaian peringkat kinerja perusahaan (PROPER) menjadi media pemaksa agar perusahaan dapat menjalankan usahanya tanpa mengabaikan prinsip – prinsip pengelolaan lingkungan hidup b. Adanya komitmen pemkab/pemkot di wilayah DIY dalam meningkatkan ketersediaan ruang terbuka hijau di wilayahnya c. Pengembangan pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan hutan lindung diarahkan ke wisata edukasi lingkungan d. Kondisi geografis DIY yang unik dan statusnya sebagai kota pelajar merupakan peluang besar bagi para akademisi untuk berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam mitigasi dan antisipasi bencana alam e. Pemerintah Pusat (Kemenkeu) bekerja sama dengan UNDP akan memperluas implementasi penandaan anggaran untuk perubahan iklim (Climate Budget Tagging/CBT) kepada 6 pemda di tahun 2021, salah satunya DIY. CBT merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mengendalikan resiko perubahan iklim f. UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang mendukung pelaksanaan pengelolaan lingkungan berbasis kearifan budaya. Hal ini menjadi peluang bagi Pemda DIY untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup g. Perda DIY Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah menjadi payung hukum pemerintah daerah dalam pencegahan penurunan kualitas dan kuantitas air h. Perda DIY Nomor 3 Tahun 2011 yaitu pemberlakuan pajak progresif terhadap kepemilikan kendaraan bermotor roda 4

Tantangan	Peluang
<p>new normal</p> <p>l. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja</p>	<p>untuk menekan laju pertumbuhan kendaraan bermotor khususnya roda 4</p> <p>i. Tingginya antusiasme dan aksi swadaya warga masyarakat dalam pengelolaan sampah, misalnya dalam mendirikan TPS3R dan Bank Sampah</p> <p>j. Potensi leverage pendapatan masyarakat, PDRB dan iklim investasi di DIY dari sektor ekonomi sirkular</p>
Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan	
<p>a. Belum optimalnya luas pemanfaatan hutan sementara masih terdapat area lahan tidak produktif dan lahan kritis dalam kawasan</p> <p>b. Belum optimalnya peran aktif masyarakat, pemerintah desa, dan para pihak dalam pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan kayu (HHK), hasil hutan bukan kayu (HHBK), potensi wisata dan jasa lingkungan.</p> <p>c. Penyelenggaraan rehabilitasi belum direncanakan secara baik dalam satu kesatuan pengelolaan</p> <p>d. Tingginya tekanan masyarakat desa hutan untuk pemenuhan lahan pertanian, hijauan pakan ternak, kayu bakar, dan kayu pertukangan</p> <p>e. Perlindungan dan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat sekitar hutan belum dibangun dalam kerangka yuridis legal formal yang kuat, kejelasan hak dan kewajiban, dan perjanjian kerjasama yang saling menguntungkan.</p> <p>f. Pengelolaan hutan rakyat masih dilakukan secara konvensional seperti belum digunakannya bibit unggul, belum diterapkannya teknik silvikultur sesuai kaidah teknik kehutanan.</p> <p>g. Pemasaran hasil hutan kayu rakyat (<i>market chain</i>) terlalu panjang, dan masih dalam bentuk log/kayu bulat, sehingga petani hutan rakyat tidak menikmati manfaat yang seharusnya dari hasil hutan rakyat</p> <p>h. Kelembagaan Unit Manajemen Hutan Rakyat (UMHR) belum tertata dengan baik yang dapat berpengaruh pada posisi tawar petani hutan rakyat.</p> <p>i. Masih rendahnya kontribusi subsektor kehutanan dan penebangan terhadap PDRB.</p> <p>j. Tahapan pengelolaan hutan belum dilakukan secara baik berlandaskan pada prinsip “Pengelolaan Hutan Lestari”</p> <p>k. Masa panen kayu yang lama mengakibatkan produktivitas hutan</p>	<p>a. Rasio pemanfaatan hutan</p> <p>b. Pelibatan masyarakat, pemerintah desa, dan pihak terkait untuk bersama-sama mengelola dan memanfaatkan sumber daya hutan seiring lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.</p> <p>c. Fasilitasi penyusunan dokumen Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RP-RHL), serta dokumen Rencana Teknis Tahunan (RTT-RHL)</p> <p>d. Pengembangan/pemanfaatan jasa lingkungan- ekowisata di kawasan hutan negara dan hutan rakyat sebagai alternatif mata pencaharian bagi masyarakat desa hutan</p> <p>e. Dukungan kebijakan pemerintah pada kegiatan pemberdayaan dan pelibatan masyarakat dan/atau pemerintah desa dalam pengelolaan sumber daya hutan melalui skema kerjasama/ kemitraan dan perhutanan sosial</p> <p>f. Pengembangan komoditi unggulan setempat berbasis karakteristik lokal seperti nangka, bambu, dan hutan serbaguna dan pengembangan ASDG (Areal Sumber Daya Genetik) melalui penyediaan bibit berkualitas</p> <p>g. Adanya inisiasi untuk pengolahan kayu hasil hutan rakyat menjadi produk setengah jadi (<i>sawmill</i>) atau produk jadi (<i>furniture</i>) seperti di UMHR Wonolestari Bantul</p> <p>h. Adanya pendampingan dari pihak terkait termasuk LSM bagi UMHR dalam meraih sertifikasi, misalnya SLVK dan PHBML untuk menaikkan posisi tawar</p> <p>i. Peningkatan kontribusi pendapatan asli daerah melalui kegiatan pemanfaatan HHK/pemanenan Tegakan GNRHL</p> <p>j. Balai KPH Yogyakarta mulai menerapkan prinsip – prinsip pengelolaan hutan lestari seperti penyusunan rencana pengelolaan hutan, tata hutan hingga tingkat petak, rehabilitasi dan intensifikasi tegakan hutan, perlindungan hutan, konservasi plasma nutfah serta pemberdayaan masyarakat sekitar hutan</p> <p>k. Optimalisasi produktivitas hasil hutan bukan kayu khususnya minyak kayu putih melalui</p>

Tantangan	Peluang
<p>menurun drastis pasca penebangan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="293 259 807 443">l. Masih minimnya kerja sama lintas sektor dan lintas daerah dalam pengelolaan hutan lestari dan peningkatan taraf hidup masyarakat yang tinggal di daerah penyangga kawasan konservasi <li data-bbox="293 450 807 539">m. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 	<p>penanaman/pembongkaran tegakan tanah kosong dan pengkayaan (penambahan jumlah tanaman) untuk perbaikan kondisi tegakan menuju tegakan normal.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="868 353 1445 687">l. Ditetapkannya Cagar Biosfer Merapi, Merbabu, Menoreh pada tahun 2020 yang wilayahnya meliputi Taman Nasional Gunung Merapi, Taman Nasional Gunung Merbabu, dan Suaka Margasatwa Sermo sebagai zona inti, berikut kawasan di sekitarnya sebagai zona penyangga dan zona transisi. Adanya cagar biosfer ini membuka peluang kerja sama antar daerah yang wilayah administratifnya masuk dalam cagar biosfer ini.

BAB 3 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Perubahan iklim merupakan tantangan global yang tak terelakkan dan mendesak dengan implikasi jangka panjang bagi pembangunan berkelanjutan di semua negara. Dalam dalam acara *B20-G20 Dialogue: Energy, Sustainability, and Climate Task Force* pada Selasa 30 Agustus 2022, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa menurut sebuah penelitian, Indonesia akan terkena dampak sebesar 0,66 persen hingga 3,45 persen dari PDB (produk domestik bruto) pada tahun 2030 karena perubahan iklim. Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmennya sejak lama terhadap kesepakatan global tentang perubahan iklim melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang UNFCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) serta Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pada tahun 2015, Indonesia meratifikasi Persetujuan Paris pada COP 21 UNFCC di Paris dan memasukkan komitmen tersebut ke dalam Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa – Bangsa mengenai Perubahan Iklim. Pemerintah juga menempatkan perubahan iklim sebagai isu lintas sektoral yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Upaya mitigasi perubahan iklim dilakukan dengan cara perbaikan pengelolaan sektor kehutanan, lahan gambut, energi, transportasi, industri dan pengelolaan persampahan menjadi prioritas dalam menurunkan emisi GRK. Sementara itu, adaptasi terhadap dampak perubahan iklim mencakup sektor pertanian, kelautan dan perikanan, pengembangan daerah pesisir, infrastruktur dan kesehatan. Oleh karena itu, estafet upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim harus juga sampai kepada pemerintah daerah sebagai kepanjangan tangan pemerintah di level sub-nasional.

DIY dalam konteks perubahan iklim menghasilkan GRK dari kegiatan ekonomi, utamanya dari kegiatan penggunaan energi, industri, pertanian, peternakan, kehutanan dan pengelolaan limbah. Emisi GRK di DI Yogyakarta secara agregat mencapai 8.305,31 Gg CO₂e pada tahun 2020. Emisi GRK tahun 2017 merupakan emisi tertinggi sepanjang

periode tahun 2014 – 2020. Rata-rata pertumbuhan emisi selama empat tahun terakhir mengalami penurunan dan kenaikan. Pada tahun 2020 terjadi kenaikan mencapai 56 % dari tahun sebelumnya. Kenaikan emisi tersebut dipengaruhi oleh peningkatan emisi sektor Kehutanan, Energi dan Pertanian. Pada periode tahun 2022 – 2027, Pemerintah Daerah DIY terus meningkatkan efektivitas upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim salah satunya dengan upaya Menyusun RPPLH tingkat Provinsi dan aksi – aksi lain yang lebih nyata untuk mendukung upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim nasional.

DLHK DIY selaku perangkat daerah yang membidangi sektor lingkungan hidup dan sektor kehutanan tentunya memiliki peran yang strategis dalam mengawal upaya pemerintah daerah dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Untuk itu, perlu dilakukan pemetaan masalah yang dihadapi DLHK DIY dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Untuk memudahkan proses pemetaan Masalah Pokok hingga Akar Masalah berikut hasil identifikasi permasalahan yang dihimpun berdasarkan hasil studi pustaka dan diskusi kelompok terumpun:

A. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

1. Penegakan Hukum dan Tata Kelola Lingkungan Yang Belum Optimal

Penegakan hukum lingkungan hidup yang belum optimal ini tercermin dari tingkat ketaatan usaha/kegiatan masih rendah. Dari target tingkat ketaatan DLHK DIY tahun 2022, dari 80 usaha dan/atau Kegiatan (56,25%), terealisasi 45 usaha dan/atau Kegiatan yang TAAT (56,25%) dan 35 usaha dan/atau Kegiatan TIDAK TAAT (43,75%). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang - Undang NNomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang serta peraturan turunannya, ketaatan terdiri dari 4 kriteria yaitu persetujuan lingkungan, pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara dan pengelolaan limbah B3. Untuk menetapkan ketaatan keempat kriteria tersebut harus terpenuhi seluruhnya.

Dengan terbitnya peraturan tersebut berpotensi akan semakin menurunkan persentase usaha/kegiatan yang taat. Hal ini disebabkan karena bertambahnya ruang lingkup kewenangan pengawasan terhadap persetujuan lingkungan,

pengawasan usaha/kegiatan yang menjadi kewenangan Pemda DIY. Hingga tahun 2022 terdapat 185 unit usaha/kegiatan yang menjadi kewenangan Pemda DIY, terdiri dari: 98 unit usaha sektor industri, rumah sakit, hotel; 78 unit usaha sektor tambang pasir dan batu; serta 9 unit usaha sektor tambang kapur.

2. Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 yang Belum Optimal

Sesuai dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 123 Tahun 2018 tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 16 Tahun 2021, target pengurangan sampah DIY sebesar 30% dan penanganan sampah sebesar 70% pada tahun 2025. Pengurangan sampah di DIY pada tahun 2022 sampai 31 Desember 2022 baru tercapai 20,79% dan penanganan sampah baru mencapai 47,94%. Hal tersebut masih di bawah target Jakstrada dalam Pengelolaan Sampah. Salah satu penyebab upaya penanganan dan pengurangan sampah yang belum optimal adalah masih kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat dalam pengelolaan sampah dan lemahnya penegakan peraturan. Selain itu, terbatasnya sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang memadai di tingkat kalurahan. Berdasarkan hasil kajian Profil TPS3R, untuk memenuhi target Jakstrada diperlukan setidaknya 109 unit TPS3R di DIY, sementara menurut data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Mandiri (SIPARI) diketahui hanya terdapat 64 unit TPS3R yang terbangun, 55 unit aktif sedangkan 9 unit lainnya tidak aktif. Sementara jumlah unit bank sampah di DIY total terdapat 1.279 unit, terdiri dari 237 unit di Kabupaten Sleman, 614 unit di Kota Yogyakarta, 78 unit di Kabupaten Gunungkidul, 123 unit di Kabupaten Kulon Progo dan 227 unit di Kabupaten Bantul. Pengelola sampah mandiri tersebut masih perlu dioptimalkan perannya dalam penanganan sampah rumah tangga dan sejenis rumah tangga.

Pelayanan sampah di TPA Piyungan masih menggunakan metode *controlled landfill*. Berdasarkan dokumen OBC³, komposisi sampah yang masuk ke TPA Piyungan terdiri dari sampah organik 45,63 %, sampah anorganik yang dapat didaurulang 45,47% dan sisa/residu 8,90 %. Berdasarkan Laporan Studi Peningkatan Kinerja TPA Regional Piyungan Kab. Bantul (2017), dengan luas

³ Outline Business Case for Piyungan Waste Processing and Landfill (CRISIL, 2020) merupakan dokumen persiapan KPBU TPA Piyungan

landfill 72.620,832 m² dan rencana tinggi 34 m maka kapasitas maksimalnya adalah 864.187,9 m³. Apabila dibandingkan dengan hasil proyeksi volume sampah yang dikompaksi maka volume tersebut tercapai pada tahun 2019. Namun hingga tahun 2022, TPA Regional masih dimanfaatkan untuk menampung sampah dari Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta dengan terus mengoptimalkan daya tampung, menambah luas area landfill dan menambah sarana dan prasarana penataan sampah.

3. Rendahnya Kualitas Air

Pada tahun 2022, telah dilakukan pemantauan terhadap 10 (sepuluh) sungai secara periodik, yaitu Bulan Juni, Agustus dan Oktober. Pemantauan dilakukan pada titik – titik pantau dari hulu sampai hilir. Tujuan pemantauan tersebut adalah untuk memotret kondisi kualitas air sungai dan menjadi dasar perhitungan Indeks Kualitas Air di DIY.

Tabel 6 Status kualitas air sungai DIY Tahun 2022

No	Nama Sungai	Indeks Pencemaran	Keterangan
1.	Bedog	5,45 – 10,33	Cemar sedang – cemar berat
2.	Belik	3,62 – 11,90	Cemar ringan – cemar berat
3.	Bulus	4,54 – 8,05	Cemar ringan – cemar sedang
4.	Code	3,06 – 22,84	Cemar ringan – cemar berat
5.	Gajahwong	3,66 – 12,38	Cemar ringan – cemar berat
6.	Kuning	3,17 – 9,37	Cemar ringan – cemar sedang
7.	Konteng	6,82 – 11,94	Cemar sedang – cemar berat
8.	Oyo	5,24 – 7,73	Cemar sedang
9.	Tambakbayan	5,28 – 16,08	Cemar sedang – cemar berat
10.	Winongo	3,57 – 9,85	Cemar ringan – cemar sedang

Sumber: IKPLHD DIY, 2022

Berdasarkan IP di atas, dengan jumlah data titik pantau sebanyak 271 titik diperoleh nilai IKA di DIY pada tahun 2022 sebesar 32,14. Nilai tersebut belum memenuhi target tahun 2022 yang merupakan akhir periode RPJMD DIY Tahun 2017 – 2022 sebesar 42,50. Faktor – faktor yang menyebabkan rendahnya kualitas air sungai adalah sebagai berikut:

1. Pembuangan limbah padat dan limbah cair ke sungai baik yang berasal dari rumah tangga maupun peternakan dan UMKM
2. Operasional kegiatan industri dan izin pembuangan limbah industri belum efektif mempertimbangkan daya tampung beban pencemar
3. Degradasi fungsi lahan pada daerah resapan air akibat adanya penurunan kerapatan vegetasi dan menyebabkan air hujan kurang efektif terserap tanah sehingga berpotensi menurunkan debit air sungai. Berkurangnya debit air sungai mengakibatkan konsentrasi zat pencemar meningkat meskipun volume zat pencemar relatif tetap
4. Penggunaan pupuk kimia dan pestisida yang tidak ramah lingkungan pada sektor pertanian masih banyak
5. Konversi lahan pertanian, perkebunan dan hutan menjadi daerah permukiman, kawasan perdagangan dan pusat produksi barang atau jasa mengakibatkan peningkatan volume limbah dan sampah yang masuk ke sungai
6. Pertambahan beban pencemaran yang lebih tinggi dibandingkan upaya penurunan beban pencemaran khususnya dari kegiatan rumah tangga

4. Rendahnya Tutupan Vegetasi

Capaian IKTL mengalami penurunan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021. Data realisasi IKTL ditahun 2018 sebesar 60,86 turun menjadi 58,34 ditahun 2021 dan di tahun 2022 IKTL meningkat sedikit menjadi 58,82. Berdasarkan data capaian IKTL DIY dan faktor yang mempengaruhi nilai IKTL tersebut maka upaya membangun Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan akan memberikan pengaruh signifikan terhadap IKTL DIY. Data capaian IKTL DIY 2018 – 2022 sebagaimana grafik berikut ini:



Gambar 3 Data capaian IKTL DIY 2018 - 2022

Berdasarkan perbandingan antara target dan realisasi, dapat disimpulkan bahwa penetapan target IKTL cenderung meningkat drastis tiap tahun sementara realisasi relatif mendatar. Berdasarkan kondisi di lapangan, luas wilayah DIY tidak dapat bertambah sementara jumlah penduduk berikut aktivitas ekonominya terus meningkat sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut ada hal yang harus trade-off

B. Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan

DIY memiliki luas hutan sebesar 98.396,53 ha yang terdiri dari hutan negara seluas 19.133,95 ha dan hutan rakyat seluas 79.262,58 ha. Hutan negara sendiri terbagi menjadi hutan konservasi seluas 3.316,87 ha, hutan produksi seluas 13.519,47 ha, dan hutan lindung seluas 2.297,61 ha. Sedangkan hutan rakyat tersebar di Kabupaten Gunungkidul seluas 54.548,904 ha, Kabupaten Kulon Progo seluas 12.338,347 ha, Kabupaten Sleman seluas 2.469,518 ha, dan Kabupaten Bantul seluas 9.905,811 ha. Dibandingkan dengan luas DIY, maka luas hutannya mencapai 30,88%.

1. Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Sekitar Hutan Yang Masih Rendah

Di Daerah Istimewa Yogyakarta, terdapat 91 Kalurahan yang terletak di dalam atau berbatasan dengan kawasan hutan sehingga kehidupan masyarakatnya bergantung atau memiliki ikatan erat dengan hutan di sekitarnya. Berdasarkan data dari aplikasi Dataku Bappeda DIY, per tahun 2022 Indeks Gini DIY adalah 0,439, lebih besar dari nilai Indeks Gini nasional sebesar 0,384. Angka ini menunjukkan bahwa DIY masih menghadapi tantangan dalam mengatasi kemiskinan dan kesenjangan yang terus meningkat.

Perhutanan sosial bertujuan untuk memberikan akses secara legal kepada masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya hutan dan dalam rangka pengelolaan konflik tenurial. Pemerintah DIY melalui Balai KPH Yogyakarta telah mengalokasikan 1565,88 ha kawasan hutan yang dapat diakses oleh masyarakat melalui berbagai skema perhutanan sosial, antara lain Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR). Berdasarkan Keputusan Menteri LHK tentang Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) Revisi VII tertanggal 31 Desember 2021 untuk wilayah DIY pemberian izin pengelolaan hutan ditargetkan seluas 3.561 ha sehingga masih perlu dilakukan penambahan izin kurang lebih 1.995,12 ha.

Jumlah perhutanan sosial di DIY sampai dengan tahun 2022 45 KTH, terdiri dari HKm dan HTR. Pada periode tahun 2022 – 2027, Perhutanan Sosial kan diprioritaskan untuk peningkatan kapasitas Kelola KTH untuk mempertahankan jumlah yang ada karena kondisi KTH HKm dan HTR masih belum sepenuhnya aktif dan mandiri, melalui kemudahan dalam investasi/kemitraan, peningkatan produksi komoditas bernilai tambah ekonomi, dukungan promosi serta pemasaran produk – produk perhutanan sosial.

2. Belum Optimalnya Penanganan Lahan Kritis

Kondisi hutan dan lahan di DIY mempengaruhi Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) yang merupakan salah satu komponen penyusun IKLH. Hingga tahun 2022 penanganan lahan kritis yang dilakukan di DIY baru mencapai 5,655%. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 7 Penanganan lahan kritis 2018 - 2022

Tahun	Luas lahan kritis provinsi yang direhabilitasi (ha)	Keterangan
2018	311,04	
2019	1099	
2020	985,42	
2021	922,22	
2022	1156,5	41,5 ha dari APBD DLHK DIY, 565 ha KBR, 550 penanaman RHL oleh BPDAS di area KPH Yogyakarta dan KPHK Bunder
Total	4474,18	

Tahun	Luas lahan kritis provinsi yang direhabilitasi (ha)	Keterangan
Luas Lahan kritis DIY menurut SK Menteri LHK Nomor 306 tahun 2018	79.123 ha	
Persentase penanganan Rehabilitasi	5,655%	

3. Peran Sektor Kehutanan sebagai *Nature Sanctuary*

DIY sebagai salah satu wilayah yang memiliki keragaman habitat tinggi memiliki beberapa kawasan konservasi yang dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu kawasan konservasi pemerintah dan juga kawasan konservasi non pemerintah. Kawasan Konservasi adalah kawasan yang ditetapkan fungsinya sebagai kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Alasan dari yang wilayah dilindungi ini adalah karena karena nilai-nilai lingkungan alaminya, lingkungan sosial budayanya, atau karena hal-hal lain yang serupa dengan itu. Kawasan Konservasi atau kawasan yang dilindungi ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan berbagai macam kriteria sesuai dengan kepentingannya. Kawasan konservasi secara umum mencakup dua kelompok besar, yaitu Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA). Kawasan Suaka Alam yang terdiri dari Cagar Alam dan Suaka Margasatwa, bertujuan untuk perlindungan sistem penyangga kehidupan dan pengawetan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Tabel 8 Kawasan Konservasi di DIY

No.	Nama	Lokasi Administrasi	Luas (ha)	Pengelola
1.	Cagar Alam Imogiri	Wukirsari dan Girirejo, Kec. Imogiri, Kab. Gunungkidul	11.820	Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta
2.	Suaka Margasatwa Paliyan	Kec. Paliyan, Gunungkidul	434.834	Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta
3.	Suaka Margasatwa Sermo	Kulon Progo	184.900	Balai Konservasi

No.	Nama	Lokasi Administrasi	Luas (ha)	Pengelola
				Sumber Daya Alam Yogyakarta
4.	Cagar Alam Batu Gamping	Ambarketawang, Gamping	1.069	Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta
5.	Taman Nasional Gunung Merapi	Kec. Turi	1.728	Balai Taman Nasional Gunung Merapi
6.	Taman Hutan Raya Bunder	Playen, Kab Gunungkidul dan Imogiri Kab. Bantul	634	Balai Tahura Bunder (DLHK DIY)
7.	KBAK Gunung Sewu	Kab. Bantul dan Kab. Gunungkidul	65.418,95	Pemkab. Gunungkidul dan Pemkab. Bantul (DIY), Pemkab. Pacitan (Jawa Timur)
8.	Gumuk Pasir	Parangtritis, Kretek, Bantul	430	Pemkab. Bantul

Sumber: Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati (2022)

Di tengah gempuran alih fungsi lahan, menurunnya kualitas lingkungan hidup dan perubahan iklim, kawasan konservasi menjadi tempat teraman bagi kelangsungan hidup flora dan fauna yang ada. Apalagi di tengah isu kemiskinan dan kesenjangan ekonomi yang membayangi DIY sehingga prioritas perlindungan flora dan fauna dan pengelolaan kawasan konservasi menjadi semakin tersingkirkan.

Untuk dapat mengadvokasi perlunya pengelolaan kawasan konservasi kondisi eksisting kawasan harus dapat dikuantifikasi. Oleh karena itu diperlukan suatu instrumen yang dapat mengukur tingkat keberhasilan pengelolaan kawasan konservasi. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI mengeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor P.12/KSDAE/SET/KUM.1/12/2017 tentang Pedoman Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi yang dapat dipergunakan sebagai metode untuk

menilai sejauh mana tingkat pengelolaan kawasan konservasi yang telah dilakukan. Diharapkan dengan adanya pengukuran tersebut dapat memotivasi pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan kawasan konservasi. Tahura Bunder sebagai satu – satunya kawasan konservasi yang dikelola oleh DLHK DIY pada tahun 2021 memperoleh nilai efektivitas pengelolaan 70.⁴ Nilai ini termasuk sedang dan masih memungkinkan untuk ditingkatkan.

4. Tindak Lanjut Penerapan Tata Kelola Hutan Lestari

Pada periode tahun 2022 – 2027, perbaikan tata Kelola hutan produksi sudah mulai dirintis dilakukan; antara lain perencanaan teknis tahunan, penyelesaian konflik, penyelesaian tumpang tindih penggunaan Kawasan, dan perbaikan pengelolaan hutan produksi pada tingkat tapak. Melalui upaya tersebut kualitas tutupan hutan pada hutan produksi diharapkan dapat ditingkatkan, sehingga pada gilirannya dapat meningkatkan kontribusi ekonomi kayu dan hasil hutan bukan kayu yang berasal dari Kawasan hutan. DLHK DIY telah mengambil berbagai upaya untuk memfasilitasi pemanfaatan jasa lingkungan melalui kerja sama dengan masyarakat, seperti pengembangan Hutan Wana Wisata Budaya Mataram yang berada di wilayah RPH Mangunan (2017), Watu Payung, Kalibiru, dll. Pada tahun 2022 DLHK DIY juga bekerja sama dengan WWF telah merintis adanya pengadaan berkelanjutan untuk mendukung penguatan sistem SLVK dan SIPUHH dan memberikan benefit kepada pemegang izin usaha yang taat.

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan di atas, selanjutnya dibuat pemetaan masalah dengan mengkategorisasi item permasalahan berdasarkan hubungan sebab akibat dan besar/kecil ruang lingkup yang dipengaruhinya. Adapun hasil pemetaan masalah urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan urusan pemerintahan bidang kehutanan disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 9 Identifikasi Permasalahan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3
1. Perlindungan dan Pengelolaan	1. Rendahnya tingkat ketaatan pemrakarsa kegiatan dalam	a. Penegakan hukum lingkungan yang belum terpadu antar sektor yang mengakibatkan lemahnya

⁴ Sesuai Keputusan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor SK.4/KSDAE/KK/KSA.1/1/2022 tentang Penetapan Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Sampai Dengan Tahun 2021

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3
Lingkungan Hidup	pengelolaan lingkungan hidup	<p>penegakan hukum</p> <p>b. Masih rendahnya kesadaran dalam menindaklanjuti ketentuan dalam dokumen lingkungan hidup</p>
	2. Belum optimalnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	<p>a. Kesadaran masyarakat dan pelaku industri akan penanganan limbah masih rendah sehingga terjadi pencemaran air, udara dan tanah</p> <p>b. Belum terkelolanya sampah dan limbah B3 secara optimal ditingkat usaha/kegiatan dan masyarakat umum</p> <p>c. Pelayanan pengujian laboratorium perlu ditingkatkan</p> <p>d. Terbatasnya jumlah pejabat pengawas lingkungan hidup</p>
	3. Rendahnya kapasitas SDM di bidang pengelolaan lingkungan hidup	<p>a. Belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup di DIY karena kurangnya kapasitas masyarakat yang memahami tentang permasalahan lingkungan dan penangannya</p> <p>b. Belum terpenuhinya kapasitas laboratorium lingkungan secara kualitas (standar mutu dan akreditasi) dan kuantitas (sarana dan prasarana serta jumlah SDM)</p>
	4. Belum optimalnya pengelolaan persampahan regional	<p>a. Tidak sebandingnya volume sampah dengan sarana prasarana pengelolaan sampah di TPA.</p> <p>b. belum optimalnya pengelolaan sampah dari sumber menyebabkan tingginya volume sampah yang dibuang ke TPA</p>
	5. Penyesuaian era new normal, perbaikan tata Kelola ekonomi pasca pandemi dan antisipasi terhadap kondisi <i>Force Majeur</i> kesehatan di masa depan	<p>a. Munculnya permasalahan lingkungan yang berdampak pada SDM belum dapat diantisipasi secara cepat dan optimal</p> <p>b. Berpengaruhnya terhadap optimalisasi kinerja karena keterbatasan aktivitas kerja</p> <p>c. Menurunnya tingkat kesehatan lingkungan mengakibatkan derajat kesehatan masyarakat juga menurun</p> <p>d. Perlunya penyesuaian terhadap sistim kerja dan sistem penganggaran yang berdampak pada perubahan fokus program</p>

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3
		kegiatan
2. Belum optimalnya kinerja tata Kelola hutan lestari	1. Belum optimalnya perencanaan serta pembinaan usaha kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Belum optimalnya pengelolaan sumber daya hutan baik potensi HHK, HHBK, potensi wisata dan jasa lingkungan di kawasan hutan sebagai salah satu faktor pengungkit untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat b. Pelaksanaan penatausahaan produksi hasil hutan yang masih belum sesuai dengan kondisi ideal c. Masih ditemui di beberapa lokasi ketidakjelasan batas kawasan hutan dengan non kawasan hutan yang berpotensi adanya pembibrikan lahan dan/atau okupasi lahan
	2. Pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung di DIY belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> a. Rasio pemanfaatan hutan yang masih belum optimal b. Adanya gangguan terhadap sumberdaya hutan baik gangguan alam maupun manusia c. Kondisi tegakan hutan di Yogyakarta sebagian besar didominasi tegakan umur muda dan jumlah batang per hektar di bawah standar normal/optimal
	3. Rendahnya presentase terkelolanya hutan konservasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Upaya konservasi, rehabilitasi, dan pengkayaan sumberdaya hutan dalam pemenuhan keseimbangan lingkungan masih perlu ditingkatkan. b. Pemanfaatan fungsi hutan untuk pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, pariwisata, dan pendidikan oleh pemerintah dan warga masyarakat belum optimal
	4. Pengembangan pembibitan tanaman kehutanan masih belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> a. Minimnya ketersediaan bibit tanaman kehutanan yang berkualitas b. Ketersediaan sumber benih berkualitas yang terbatas c. Keterbatasan kapasitas SDM untuk pengembangan bibit tanaman
	5. Kurangnya tutupan vegetasi dan belum	<ul style="list-style-type: none"> a. Belum terkelolanya Daerah Aliran Sungai/DAS dengan baik

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3
	optimalnya pengelolaan sumberdaya alam	<ul style="list-style-type: none"> b. Kondisi hutan yang masih rentan terhadap gangguan c. Tingginya ancaman dan masih rendahnya kepedulian sebagian masyarakat terhadap keberadaan dan kelestarian sumber alam d. Tingginya alih fungsi lahan di DIY e. belum adanya manajemen pengelolaan DAS yang terintegrasi antar stakeholders

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah. Visi Gubernur DIY Periode 2022 – 2027 adalah

“Terwujudnya PANCAMULIA Masyarakat Jogja melalui Reformasi Kalurahan, Pemberdayaan Kawasan Selatan, Serta Pengembangan Budaya Inovasi Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi”

Pancamulia sebagai Visi Gubernur DIY 2022 – 2027 merupakan Visi Dasar yang nantinya akan menjadi rujukan dalam menyusun RPJPD 2025 – 2045. Visi Dasar ini juga ditujukan untuk menganyam keberlanjutan Visi RPJPD 2022 – 2025 dengan visi RPJPD 2025 – 2045 mengingat kurun waktu 2022 – 2027 merupakan kurun waktu dimana RPJMD akan berada di tengah waktu berakhirnya RPJPD 2005 – 2025.

Sementara Misi merupakan turunan visi dengan orientasi pada rumusan cara atau sarana agar visi yang ada dapat diwujudkan. Adapun Misi Gubernur DIY 2022 – 2027 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan, pembangunan yang

inklusif dan pengembangan kebudayaan melalui reformasi kalurahan;

2. Memberdayakan Kawasan Selatan dengan mengoptimalkan dukungan infrastruktur, peningkatan kapasitas SDM, dan perlindungan/pengelolaan sumber daya setempat;
3. Meningkatkan budaya inovasi dan mengoptimalkan kemanfaatan kemajuan teknologi informasi;
4. Melestarikan lingkungan dan warisan budaya melalui penataan ruang dan pertanahan yang lebih baik

Arah pembangunan lingkungan hidup di DIY ditujukan untuk melestarikan lingkungan hidup yang ada, khususnya menyangkut 5 hal yakni: pengendalian pencemaran lingkungan, pencegahan dan pengendalian kerusakan lingkungan, pelestarian keanekaragaman hayati, pencapaian kesepakatan perubahan iklim serta pembangunan rendah karbon serta pengurangan resiko bencana.

DLHK DIY secara hierarkhi mendukung ketercapaian 3 misi, yaitu misi ke 1, 2 dan 4. Untuk mendukung ketercapaian Misi ke-1 melalui Tujuan Terwujudnya Kualitas Hidup-Kehidupan-Penghidupan Masyarakat dan Sasaran Kualitas SDM Yogyakarta yang Dapat Diandalkan, DLHK DIY mengemban peran dalam Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup khususnya Program Pengelolaan Persampahan. Misi ke-2 diuraikan menjadi Tujuan Pemda Mengecilnya Ketimpangan Wilayah dan Sasaran Pemda Meningkatnya Kapasitas Ekonomi pada Kawasan Belum Maju, didukung oleh Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan khususnya melalui Program yang terkait Perhutanan Sosial. Sedangkan Misi ke-4 yang diuraikan menjadi Tujuan Pemda Terwujudnya Lingkungan Hidup yang Lebih Baik dan Sasaran Pemda Terwujudnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang didukung oleh Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan.

3.3 Telaah Renstra K/L dan Kabupaten/Kota

a. Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 – 2024 merupakan langkah – langkah pencapaian yang menjadi tugas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam mewujudkan arahan sasaran strategis nasional yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024.

Sasaran strategis akan dicapai KLHK pada tahun 2020-2024 adalah:

1. **Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim** dengan indikator yaitu: (1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH); (2) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang terverifikasi pada Sektor Kehutanan dan Limbah; (3) Penurunan laju deforestasi; (4) Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS); (5) Luas lahan dalam DAS yang dipulihkan kondisinya; (6) Luas kawasan bernilai Konservasi Tinggi (HCV - *High Conservation Values*)
2. **Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan** dengan indikator yaitu: (1) Kontribusi Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PDB Nasional; (2) Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL dan Bioprospecting; (3) Penilaian nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional KLHK
3. **Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan** dengan indikator yaitu: (1) Luas kawasan hutan dengan Status Penetapan; (2) Luas kawasan hutan yang dilepas untuk TORA (Tanah Objek Reformasi Agraria); (3) Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat
4. **Terselenggaranya tata kelola dan inovasi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan (LHK) yang baik serta kompetensi SDM LHK yang berdaya saing** dengan indikator yaitu: (1) Indeks efektivitas pengelolaan kawasan hutan; (2) Jumlah kasus LHK yang ditangani melalui Penegakan Hukum; (3) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks SPBE); (4) Hasil Litbang yang inovatif dan/atau implementatif; (5) Nilai kinerja reformasi birokrasi; (6) Opini WTP atas Laporan Keuangan KLHK; (7) Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK; (8) Level Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) KLHK.

Tabel 10 Faktor - faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY Ditinjau dari Sasaran Jangka Menengah Renstra KLHK

No	Sasaran Strategis Renstra KLHK	Permasalahan Pelayanan di DLHK DIY	Faktor	
			Pendorong	Penghambat
1	2	3	4	5
1.	Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya beban pencemaran yang mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan hidup 2. Keterbatasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) akibat alih fungsi lahan 3. Pengelolaan sampah yang belum sepenuhnya dapat menerapkan konsep 3R (<i>Reduce, Reuse, Recycle</i>) 4. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup 5. Belum optimalnya koordinasi antar pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2. Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur DIY mengenai pengelolaan sampah dan limbah 3. IKLH menjadi indikator sasaran pembangunan DIY dalam RPJMD DIY 2017 - 2022 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya SDM dalam pengawasan lingkungan 2. Kurangnya koordinasi antar perangkat daerah dalam pemantauan dan pengelolaan lingkungan 3. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah dengan prinsip 3R
2.	Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan	Luasan hutan negara di DIY sangat terbatas Pemanfaatan fungsi hutan	Dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, pemerintah pusat mendorong KPH	Valuasi keberhasilan pengelolaan hutan dengan hanya mendasarkan pada

No	Sasaran Strategis Renstra KLHK	Permasalahan Pelayanan di DLHK DIY	Faktor	
			Pendorong	Penghambat
	lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan	untuk pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, pariwisata, dan pendidikan belum optimal Pengembangan potensi hutan rakyat masih belum optimal	untuk terus eksis dalam pengelolaan hutan hingga ke tingkat tapak Adanya kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengelolaan hutan produksi memberikan dampak positif Rintisan pengelolaan sumber daya hutan baik potensi HHK, HHBK, potensi wisata dan jasa lingkungan di kawasan hutan sebagai salah satu faktor pengungkit untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, dan kesejahteraan masyarakat memberikan dampak positif	produksi kayu saja sangat sulit diterapkan di DIY Masih kurangnya keterlibatan pemerintah di level tapak, khususnya pelibatan pemerintah desa dan masyarakat desa hutan dalam pengelolaan hutan seiring dengan penerapan paradigma perhutanan sosial, dan pemberlakuan UU Desa
3.	Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan	Kurangnya kapasitas SDM dalam tata kelola hutan	Meningkatnya frekuensi pendampingan dalam tata kelola hutan oleh dinas	Masih adanya ego sektoral di sebagian pihak terkait (khususnya antar SKPD di lingkup pemerintah daerah) dalam pendampingan dan pemberdayaan petani hutan rakyat.
4.	Terselenggaranya tata kelola dan inovasi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan (LHK) yang baik serta kompetensi SDM LHK yang berdaya saing	Masih belum optimalnya penanaman semangat inovasi dalam pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan	Ketersediaan SDM LHK yang mencukupi	Peningkatan kapasitas SDM dan pengembangan inovasi belum terlalu gencar disosialisasikan kepada SKPD

b. Renstra DLH Kabupaten/Kota

Tabel 18 Faktor - faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY Ditinjau dari Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

No	Sasaran Strategis Renstra DLH Kabupaten/Kota	Permasalahan Pelayanan di DLHK DIY	Faktor	
			Pendorong	Penghambat
1	2	3	4	5
Renstra DLH Kab. Kulon Progo 2017 -2022				
1.	Meningkatnya konservasi perlindungan dan pengendalian Sumber Daya Alam secara berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya beban pencemaran yang mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan hidup Keterbatasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) akibat alih fungsi lahan Belum optimalnya koordinasi antar pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 	<ol style="list-style-type: none"> Kondisi tutupan vegetasi yang masih relative luas termasuk Kawasan mangrove Kebijakan bela dan beli kulon progo yang dapat mendukung penurunan carbon footprint 	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya alih fungsi lahan karena aktivitas bandara baru di Kulon Progo Kurangnya SDM dalam pengawasan lingkungan Kurangnya koordinasi antar perangkat daerah dalam pemantauan dan pengelolaan lingkungan Aktivitas penambangan galian C yang kurang terkontrol
Perubahan Renstra DLH Kab. Bantul 2017 – 2021				
1.	Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran untuk mendukung profesionalisme kinerja instansi	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya beban pencemaran yang mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan hidup Keterbatasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) akibat alih fungsi lahan Belum 	<ol style="list-style-type: none"> Kebijakan “Bantul bebas sampah” oleh Bupati Bantul Potensi pemanfaatan sumber energi terbarukan Dukungan pemerintah terhadap eksistensi bank sampah 	<ol style="list-style-type: none"> Pengelolaan TPST piyungan yang masih belum ideal Fungsi pengawasan lingkungan hidup yang masih belum optimal Kurangnya kesadaran pelaku usaha dan masyarakat dalam
2.	Penurunan beban pencemaran lingkungan hidup	<ol style="list-style-type: none"> Keterbatasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) akibat alih fungsi lahan Belum 	<ol style="list-style-type: none"> Kebijakan “Bantul bebas sampah” oleh Bupati Bantul Potensi pemanfaatan sumber energi terbarukan Dukungan pemerintah terhadap eksistensi bank sampah 	<ol style="list-style-type: none"> Pengelolaan TPST piyungan yang masih belum ideal Fungsi pengawasan lingkungan hidup yang masih belum optimal Kurangnya kesadaran pelaku usaha dan masyarakat dalam

No	Sasaran Strategis Renstra DLH Kabupaten/Kota	Permasalahan Pelayanan di DLHK DIY	Faktor	
			Pendorong	Penghambat
1	2	3	4	5
3.	Peningkatan luas tutupan lahan	optimalnya koordinasi antar pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup		pengelolaan sampah
4.	Peningkatan pengetahuan, pemahaman serta kepatuhan semua pihak agar dapat berperan aktif dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup			
Perubahan Perubahan Renstra DLH Kab. Sleman 2017 - 2021				
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	1. Meningkatnya beban pencemaran yang mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan hidup 2. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan	1. Keberadaan institusi akademis yang banyak di Kab Sleman 2. Adanya kebijakan Kawasan pertanian berkelanjutan	1. Peningkatan aktivitas alih fungsi lahan 2. Kurangnya koordinasi antar perangkat daerah dalam penentuan kebijakan 3. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat khususnya masalah sanitasi
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik			
3.	Meningkatnya kelestarian fungsi lingkungan hidup			
4.	Meningkatnya pelayanan dan penyediaan prasarana dan sarana sanitasi			
Perubahan Renstra DLH Kab. Gunungkidul 2017 - 2022				
1.	Kualitas Lingkungan Hidup Meningkat	Meningkatnya beban pencemaran yang mengakibatkan	1. Potensi wisata berbasis ecotourism 2. Potensi sumber	1. Peningkatan kunjungan wisata di Kab. Gunung Kidul menimbulkan

No	Sasaran Strategis Renstra DLH Kabupaten/Kota	Permasalahan Pelayanan di DLHK DIY	Faktor	
			Pendorong	Penghambat
1	2	3	4	5
		penurunan kualitas lingkungan hidup	air bawah tanah 3. Tutupan vegetasi yang cukup baik yang disumbang dari luasan hutan rakyat dan hutan negara 4. Pengembangan pasar ekologi sebagai upaya pemanfaatan lahan bekas tambang	masalah lingkungan baru 2. Timbunan sampah yang belum terkelola dengan baik 3. Penambangan batu kapur di Kawasan karst yang cukup massive
Perubahan Renstra DLH Kota Yogyakarta 2017 - 2022 (Reviu Th.2020)				
1.	Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Terkendali	1. Meningkatnya beban pencemaran yang mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan hidup	1. Adanya Perwal terkait kebijakan RTH, dan pengelolaan sampah ditingkat kelurahan	1. Pembangunan property yang cukup tinggi dengan dalih peningkatan aktifitas pariwisata
2.	Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Meningkat	2. Keterbatasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) akibat alih fungsi lahan	2. Penataan Kawasan sempadan sungai	2. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah dengan prinsip 3R
3.	Kualitas Pengurangan dan Penanganan Sampah Meningkat	3. Pengelolaan sampah yang belum sepenuhnya dapat menerapkan konsep 3R (<i>Reduce, Reuse, Recycle</i>)		

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 – 2039, penataan ruang wilayah DIY mempunyai tujuan mewujudkan DIY sebagai pusat pendidikan, budaya, dan daerah tujuan wisata terkemuka berkelas dunia dengan mengedepankan keterpaduan pembangunan antar sektor berbasis mitigasi bencana, keistimewaan tata ruang DIY, dan lingkungan melalui penataan ruang yang berkualitas dan berkelanjutan. Adapun strategi RTRW DIY yang memiliki keterkaitan dengan ketugasan DLHK DIY adalah sebagai berikut:

1. Strategi untuk pengembangan, pembangunan, pemantapan dan revitalisasi pariwisata berbasis budaya dan alam, serta pengembangan pariwisata minat khusus, terdiri atas: Melestarikan potensi pariwisata alam, budaya, dan minat khusus; Mengembangkan obyek dan daya tarik wisata termasuk desa wisata dan desa budaya; dan Mengendalikan pembangunan fasilitas kepariwisataan bagi kawasan pariwisata sesuai dengan daya dukung lingkungan.
2. Strategi untuk pembangunan infrastruktur penunjang kegiatan ekonomi dengan mengedepankan penggunaan sumber energi baru terbarukan dan teknologi ramah lingkungan, terdiri atas: Memantapkan infrastruktur pertanian untuk perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan; b. mengembangkan pelabuhan; Mengembangkan sumber energi baru terbarukan dari angin, matahari, bioenergi, dan air; Mengembangkan dan mengelola sumber daya air secara terpadu berbasis wilayah sungai dan cekungan air tanah; Mengembangkan infrastruktur kawasan industri yang ramah lingkungan dan mendorong relokasi kegiatan industri menuju kawasan industri; dan Mengembangkan permukiman vertikal, hemat energi, dan sumber daya di kawasan perkotaan.
3. Strategi untuk penataan kawasan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung kawasan, terdiri atas: Menetapkan kawasan lindung dan kawasan budi daya dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung kawasan; Melindungi daerah aliran sungai bagian hulu dan daerah resapan air tanah; Melestarikan Kawasan Bentang Alam Karst dan Kawasan Gumuk Pasir Barchan dan mengembangkannya sebagai wisata minat khusus; Mengembangkan ruang terbuka hijau pada kawasan perkotaan; Mengembangkan sistem mitigasi bencana di seluruh wilayah DIY; dan Mengembangkan ruang ekosistem sungai sebagai wadah

aktivitas alamiah, sosiokultural dan ekonomi yang dikelola secara terpadu berbasis masyarakat

Rencana struktur ruang wilayah DIY merupakan kerangka tata ruang wilayah yang dibangun dalam konstelasi pusat kegiatan sistem perkotaan, yang saling berhierarki dan dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah. DLHK DIY memiliki kepentingan dalam mendukung sistem jaringan prasarana wilayah khususnya dalam hal:

1. Sistem Konservasi pengendalian daya rusak air, dan penyediaan air baku terdiri atas: 1. Waduk Sermo di Kabupaten Kulon Progo; 2. embung atau telaga di semua wilayah DIY; 3. pembangunan dan pengembangan bendung; 4. sistem resapan air hujan; 5. sistem pengendalian banjir sungai yang berada di Daerah Aliran Sungai Progo, Daerah Aliran Sungai Opak, Daerah Aliran Sungai Serang; 6. pengendalian banjir lahar pada sungai yang berhulu di Gunung Api Merapi; 7. pengendalian pengambilan air tanah; dan 8. pembangunan waduk atau bendungan baru.
2. Sistem Jaringan Pengolahan Air Limbah
 - a. Pengembangan dan pengelolaan instalasi pengolah air limbah terpusat berskala regional untuk melayani Kawasan Perkotaan Yogyakarta di Kec. Sewon dan Kec. Pleret, Kab. Bantul.
 - b. Pembangunan instalasi pengolah air limbah terpusat berskala kota di Kec. Wates, Kab. Kulon Progo; Kec. Bambanglipuro, Kab. Bantul; dan Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul;
 - c. Pembangunan instalasi pengolah air limbah terpusat berskala kawasan di Kec. Berbah, Kec. Ngaglik, dan Kec. Gamping Kab. Sleman, Kec. Temon dan Kec. Sentolo Kab. Kulon Progo;
 - d. Pembangunan dan pengembangan instalasi pengolah air limbah terpusat berskala komunitas untuk wilayah yang tidak terlayani instalasi pengolah air limbah terpusat berskala regional dan/atau kota di seluruh kabupaten dan kota;
 - e. pembangunan dan pengembangan instalasi pengolah lumpur tinja di seluruh kabupaten dan kota; dan
 - f. Pengembangan teknologi ramah lingkungan berbasis 3R (*reduce, reuse, recycle*).

3. Sistem Jaringan Persampahan di DIY akan diarahkan untuk mengembangkan pengelolaan sampah berbasis masyarakat perkotaan dan perdesaan. Selain itu juga melakukan pembangunan dan pengembangan tempat penampungan sementara, tempat penampungan sementara 3R dan tempat penampungan sementara 3R terpadu untuk mendukung sistem 3R di seluruh kabupaten/kota. Pengembangan dan pengelolaan tempat pemrosesan akhir sampah regional di Kec. Piyungan, pengembangan dan pengelolaan tempat pemrosesan akhir sampah di Kec. Nanggulan dan Kec. Pengasih, dan tempat pemrosesan akhir sampah di Kec. Wonosari.

Berdasarkan dokumen Laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 2022 – 2027 DLHK DIY merupakan salah satu OPD yang mengampu capaian Target Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Adapun target yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel 11 Analisis TPB yang diampu DLHK DIY dalam KLHS

Target	Indikator	Baselin e Tahun Dasar	Capaian	Gap	Target Capaian			
					20 24	20 25	20 26	2 0 2 7
6. Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan								
Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.	Kualitas air danau	Meningkat	Sudah dilaksanakan, sudah mencapai target	Tercapai	41. 72 4	42. 79 2	43. 86	4 4. 9 2 8
Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	Meningkat	Sudah dilaksanakan, belum mencapai target	Belum meningkat	31. 57	30. 10	28. 63	2 7. 1 6

Target	Indikator	Baselin e Tahun Dasar	Capaian	Gap	Target Capaian			
					20 24	20 25	20 26	2 0 2 7
Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	Ada (1 WS)	Sudah dilaksanakan, sudah mencapai target	Tercapai	1 (SI SD A)	1 (SI SD A)	1 (SI SD A)	1 (SIS DA)
Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.	Luas pengembangan hutan serta peningkatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) untuk pemulihan kawasan DAS		Tidak ada					
Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau	Ada	Sudah dilaksanakan, sudah mencapai target	Tercapa	14	14	14	14
Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau.	Luas lahan kritis dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang direhabilitasi	Berkurang	Sudah dilaksanakan, sudah mencapai target	Tercapai	0	0	0	0
1. Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi								
Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing.	Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca	Menurun	Sudah dilaksanakan, sudah mencapai target	Tercapai	42,271	41,204	40,137	39,077

Target	Indikator	Baseline Tahun Dasar	Capaian	Gap	Target Capaian			
					2024	2025	2026	2027
Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing	Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing	Menurun	Sudah dilaksanakan, sudah mencapai target	Tercapai	2.72	2.72	2.47	2.34
11. Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan								
Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.		Tidak ada data					
12. Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan								
Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	Meningkat	Sudah dilaksanakan, sudah mencapai target	Tercapai	14,475.4	16,121.7	17,768.0	19,414.3

Target	Indikator	Baselin e Tahun Dasar	Capaian	Gap	Target Capaian			
					20 24	20 25	20 26	2 0 2 7
Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	Meningkat	Sudah dilaksanakan, sudah mencapai target		18 7,5 70. 2	20 9,9 03. 0	23 2,2 35. 8	2 5 4, 5 6 8. 6
Mempromosikan praktek pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional.	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.		Tidak ada data					
15. Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayat								
Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan	Meningkat	Sudah dilaksanakan, sudah mencapai target	Tercapai	64, 24 2	63, 08 8	63, 93 4	6 4, 7 8
Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan forestasi dan reforestasi secara global	Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisinya ekosistemnya		Tidak ada data					
Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan forestasi dan reforestasi secara global	Luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem.	Meningkat	Sudah dilaksanakan, sudah mencapai target	Tercapai	86, 76 25	86, 79	86, 81 75	8 6, 8 4 5
Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan,	Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Meningkat	Sudah dilaksanakan,	Tercapai	1	1	1	1

Target	Indikator	Baselin e Tahun Dasar	Capaian	Gap	Target Capaian			
					20 24	20 25	20 26	2 0 2 7
menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan forestasi dan reforestasi secara global			sudah mencapai target					
Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	Berkura ng	Sudah dilaksanakan, sudah mencapai target	Tercapa	24. 5	6.4	0	0
Meningkatkan pembagian keuntungan yang adil dan merata dari pemanfaatan sumber daya genetik, dan meningkatkan akses yang tepat terhadap sumber daya tersebut, sesuai kesepakatan internasional	Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata.		Tidak ada data					
Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati		Tidak ada data					

Sumber : KLHS (2022)

DLHK DIY memiliki 20 indikator dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang perlu untuk diisikan, hasil analisis dari capaian tersebut terdapat 12 indikator (60%) yang capaiannya sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target, indikator tersebut diantaranya yaitu Kualitas air danau., Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk. Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau. dan beberapa indikator lainnya. Selanjutnya terdapat 1 indikator (5%) yang capaiannya sudah dilaksanakan namun belum mencapai target, indikator tersebut adalah Kualitas air

sungai sebagai sumber air baku. Kemudian terdapat sebanyak 6 indikator (30%) yang capaiannya tidak ada data, indikator tersebut yaitu indikator Luas pengembangan hutan serta peningkatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) untuk pemulihan kawasan DAS., Persentase sampah perkotaan yang tertangani, dan Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.. Diharapkan indikator untuk DLHK DIY yang memiliki capaian sudah dilaksanakan namun belum mencapai target dapat dicapai dalam 5 tahun mendatang dan untuk indikator yang belum memiliki data agar kedepannya data tersebut dapat tersedia.

3.5 Penentuan Isu – isu Strategis

Isu-isu strategis akan menentukan kinerja pembangunan dalam lima tahun mendatang. Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan kesesuaian penentuan prioritas pembangunan, sehingga dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan.

Perumusan isu-isu strategis DLHK DIY didasarkan pada beberapa aspek yaitu: (1) gambaran pelayanan DLHK DIY; (2) permasalahan penyelenggaraan urusan yang menjadi tugas fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY; (3) hasil telaah terhadap visi, misi dan program kepala daerah; (4) hasil telaah terhadap sasaran jangka menengah dalam Perubahan Renstra KLHK dan Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup kabupaten/kota; (5) hasil telaah RTRW; dan (6) hasil telaah KLHS.

Adapun isu – isu strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY adalah sebagai berikut:

1. Fenomena perubahan iklim

Meningkatnya jumlah gas rumah kaca yang terlepas ke atmosfer mengakibatkan adanya pemanasan global yang mengakibatkan peningkatan suhu udara, perubahan musim yang tidak menentu, bencana banjir, bencana kekeringan, krisis pangan dan wabah penyakit. Hal ini selain menurunkan kualitas hidup manusia juga menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem misalnya ekosistem hutan dan perairan, dan

punahnya flora dan fauna yang tidak mampu beradaptasi dengan perubahan iklim.

2. Tingginya Timbulan Sampah

Dengan bertambahnya populasi penduduk namun tidak diimbangi dengan kesadaran lingkungan yang baik mengakibatkan tingginya timbulan sampah yang dihasilkan. Penanganan sampah masih bersifat jangka pendek dengan cara *open dumping*. Hal ini juga diperparah dengan minimnya lokasi tempat pengumpulan sampah (TPS) sementara dan lemahnya manajemen pengelolaan sampah di lingkungan masing - masing. Pada akhirnya, penanganan sampah dibebankan pada TPST Piyungan yang daya tampungnya semakin menurun karena adanya keterbatasan lahan. Keterbatasan lahan dan pengolahan sampah yang belum menerapkan teknologi masih menjadi isu penting pengelolaan sampah regional di DIY. Sementara itu di satu sisi produksi sampah dari masyarakat juga belum berkurang secara signifikan karena belum optimalnya pengelolaan sampah secara 3 R (*Reduce, Reuse, Recycle*).

3. Menurunnya kualitas air;

Seiring dengan laju urbanisasi dan peningkatan taraf hidup masyarakat, aktivitas pemenuhan kebutuhan hidup menjadi semakin kompleks dan tidak terkendali sehingga seringkali mengabaikan aspek – aspek lingkungan. Terjadinya pencemaran yang berasal dari kegiatan industri, limbah domestik, penggunaan pestisida dan bahan kimia dari aktivitas pertanian; pencemaran bakteri coli dari aktivitas peternakan mengakibatkan adanya penurunan kualitas air, khususnya air sungai. Hal ini tercermin dari nilai Indeks Kualitas Air yang terus menurun dari tahun ke tahun⁵.

4. Menurunnya Kualitas Udara di Daerah Perkotaan

Meningkatnya taraf ekonomi masyarakat dan kebutuhan sarana transportasi yang tinggi karena aktivitas wisata dan pendidikan di perkotaan menyebabkan peningkatan jumlah kendaraan bermotor dan kepadatan arus lalu lintas. Adanya transportasi massal sudah menjadi kebutuhan yang mendesak sebagai salah satu sarana untuk mengatasi kepadatan lalu lintas. Kurangnya ruang terbuka hijau di perkotaan juga turut memperburuk kualitas udara, dimana polutan yang dihasilkan dari transportasi dan

⁵Nilai IKA DIY mengalami trend penurunan sejak tahun 2018 s/d 2021, yaitu berturut – turut sebesar: 40,25; 38,65; 38,43; 35,42

industri tidak ada media penetralisirnya.

5. Rendahnya Tingkat Ketaatan Lingkungan

Belum efektifnya instrumen penataan dan penegakan hukum lingkungan menyebabkan masih rendahnya tingkat ketaatan usaha/kegiatan terhadap kaidah – kaidah yang ditentukan dalam dokumen perizinan lingkungan. Padahal dalam dokumen izin lingkungan tersebut

Penambangan bahan galian golongan C di DIY sebagian besar berupa penambangan pasir dan batu kapur. Pemberian izin terhadap aktivitas penambangan bahan galian golongan C sejatinya diatur dalam Peraturan Gubernur DIY Nomor 46 Tahun 2015. Namun, pada praktiknya masih banyak yang belum memiliki izin sehingga sulit dikontrol dampaknya terhadap lingkungan. Dampak dari penambangan ilegal ini antara lain kerusakan ekosistem sungai dan karst, tanah longsor, berkurangnya debit air permukaan, dan pencemaran lingkungan.

6. Alih fungsi lahan tinggi

Proses alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian seperti kawasan pemukiman dan industri beberapa tahun terakhir ini terus meningkat tanpa mengindahkan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW). Beberapa pelanggaran juga terjadi terhadap area hutan, sempadan sungai, dan sempadan pantai. Kondisi ini dapat berdampak pada menurunnya luas tutupan vegetasi dan Ruang Terbuka Hijau (RTH), meningkatnya lahan kritis, serta kerusakan ekosistem seperti ekosistem sungai, karst dan gumpuk pasir.

7. Tingkat kesejahteraan masyarakat sekitar hutan masih rendah

Masyarakat sekitar hutan pada umumnya kesulitan untuk mengakses fasilitas yang disediakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan memiliki penghidupan yang layak. Keterbatasan tersebut membuat mereka seringkali merambah kawasan hutan karena kurangnya pengetahuan, keterdesakan ekonomi dan terbatasnya lahan garapan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah mengoptimalkan keterlibatan masyarakat sekitar hutan dalam pengelolaan hutan lestari. Pengelolaan hutan lestari merupakan pemanfaatan secara bijak terhadap

seluruh potensi hutan baik hasil hutan kayu maupun bukan kayu, termasuk jasa lingkungan, sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat ganda, yaitu kesejahteraan masyarakat dan kelestarian hutan. Untuk menuju hal tersebut maka diperlukan peningkatan kapasitas dalam hal ruang lingkup kegiatan masyarakat dalam pengelolaan hutan antara lain kelola kawasan, kelola usaha dan kelola kelembagaan

8. Pemulihan Lahan Kritis yang Belum Optimal

Luas lahan kritis DIY sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 306 Tahun 2018 adalah 79.123 ha. Hingga tahun 2021, luas lahan kritis yang terrehabilitasi hanya sebesar 3,42%. Rehabilitasi lahan kritis memerlukan biaya yang besar sementara pendanaan dari APBD terbatas apalagi di tengah pandemi Covid-19 seperti saat ini. Untuk itu perlu adanya strategi khusus untuk mempercepat upaya penanganan lahan kritis, antara lain dengan menggunakan sumber pendanaan alternatif seperti DBH-DR, Dana Alokasi Khusus, kerjasama dan CSR. Selain itu perlu adanya koordinasi dengan instansi pusat, instansi kabupaten/kota, dan stakeholder lainnya untuk penyediaan data khususnya data rehabilitasi lahan kritis agar data yang dilaporkan dapat lebih akurat dan mewakili kinerja.

9. Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Hutan Produksi dan Hutan Lindung

Untuk dapat meningkatkan tata kelola kehutanan dalam upaya optimalisasi pemanfaatan kawasan hutan, perlu ada perubahan paradigma pengelolaan sumber daya hutan dari *timber oriented* menjadi *landscape management*. Hal ini sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021. Apalagi luas kawasan hutan produksi dan hutan lindung di DIY yang relatif kecil jika dibandingkan dengan provinsi lain sehingga jika hanya mengandalkan pada produksi primer maka tidak akan mendatangkan benefit yang maksimal. Oleh karena itu pada periode mendatang perlu diterapkan strategi optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan yang efektif, efisien dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan produktivitas hutan, meningkatkan PNPB pemanfaatan hutan dan mengentaskan kemiskinan dengan tetap mempertahankan eksistensi dan fungsi hayati hutan.

10. Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial

Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) diartikan sebagai kawasan bernilai ekosistem

penting yang berada di luar Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB) yang secara ekologis menunjang kelangsungan kehidupan melalui upaya konservasi keanekaragaman hayati untuk kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia yang ditetapkan sebagai kawasan yang dilindungi. KEE menjadi upaya daerah untuk menjaga dan memelihara keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya baik di dalam maupun di luar habitatnya agar keberadaannya tidak punah, tetap seimbang, dan dinamis dalam perkembangannya. KEE juga dapat menjadi fungsi pemanfaatan yang memperhatikan keberlanjutan manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan manfaat ekologi (lestari). Kawasan Ekosistem Esensial memiliki bentuk kawasan yang berbeda-beda, yaitu kawasan lahan basah, koridor hidupan liar, areal bernilai konservasi tinggi, taman keanekaragaman hayati, hingga areal konservasi yang dikelola masyarakat. Bentuk perlindungan secara terstruktur dimulai dari perencanaan hingga evaluasi dan pembinaan. Salah satu bentuk perencanaan KEE adalah identifikasi dan inventarisasi areal-areal yang berpotensi sebagai KEE.

Pengelolaan KEE sudah berjalan pada beberapa lokasi di Indonesia seperti di pulau Jawa sudah ada 13 KEE yang mencapai 120.109,25 ha. Di DIY terdapat beberapa Kawasan yang sudah ditetapkan sebagai KEE Mangrove Baros (Kabupaten Bantul) seluas 22,7 ha, KEE Habitat Burung Migran Trisik (Kabupaten Kulon Progo) seluas 101,28 ha dan KEE Mangrove Jangkar (Kabupaten Kulon Progo) seluas 93,67 ha. Selain itu terdapat satu kawasan yang masih dalam proses pembahasan untuk ditetapkan sebagai KEE yaitu Kawasan Karst Gunungkidul.

11. Penataan Kawasan Hutan

Kawasan Hutan di DIY seluas 19.036,42 ha dengan kawasan yang dikelola oleh Pemda DIY seluas 15.581 ha (Balai KPH Yogyakarta) dan 771,32 (Balai Tahura Bunder) sehingga luas total 16.352,32 ha dengan panjang batas \pm 511,43 km. Sampai dengan Desember 2022 telah dilakukan penataan batas kawasan hutan sepanjang 511,43 km (100%) dan penyelesaian permasalahan tenurial 1.408,84 ha atau 99,58% dari total permasalahan seluas 1.414,73 ha.

Saat ini banyak dijumpai tanda batas kawasan dalam kondisi rusak, bergeser dari posisi sebenarnya bahkan tanda batas yang hilang sehingga batas kawasan hutan menjadi kabur atau tidak jelas. Kondisi tanda batas seperti ini banyak dijumpai pada kawasan hutan yang berbatasan langsung dengan lahan yang memiliki nilai tinggi secara ekonomis maupun secara sosial seperti pada lahan subur untuk pertanian, lahan strategis untuk

perdagangan, lahan yang bernilai tinggi untuk pemukiman dan lahan yang berdekatan dengan akses jalan. Tidak jelasnya batas kawasan hutan menimbulkan resiko berkurangnya luas kawasan hutan, rusaknya sumberdaya hutan dan terganggunya keberlangsungan fungsi hutan. Konflik tenurial terutama dengan masyarakat sekitar kawasan hutan merupakan tantangan utama dalam menjaga keutuhan batas dan tanda batas kawasan hutan. Konflik tenurial tersebut menimbulkan penyerobotan lahan kawasan hutan sehingga tanda batas kawasan hutan sengaja digeser atau dirusak bahkan dihilangkan.

BAB 4 TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan DLHK DIY dalam kurun waktu tahun 2022 - 2027 adalah sebagai berikut :

“Tercapainya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Serta Terwujudnya Pengelolaan Hutan Lestari”

4.2 Sasaran OPD

Sasaran organisasi merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan tujuan organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai. Dengan demikian apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai, diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah dicapai. Untuk mengukur ketercapaian sasaran, maka dirumuskan indikator. Pernyataan tujuan, sasaran jangka menengah DLHK DIY beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 12 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Perangkat Daerah: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal Kinerja Tujuan/Sasaran (Baseline 2022)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-					Kondisi Akhir Tahun (2027)
						Tahun ke-1 (2023)	Tahun ke-2 (2024)	Tahun ke-3 (2025)	Tahun ke-4 (2026)	Tahun ke-5 (2027)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Tercapainya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta terwujudnya pengelolaan hutan lestari	Ketercapaian kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta keterwujudan pengelolaan hutan lestari			n/a	82,35%	85,91%	92,76%	94,33%	100%	100%
			Tercapainya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan	21.43%	24,44%	25%	25,34%	25,66%	26,58%	26,58%

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal Kinerja Tujuan/Sasaran (Baseline 2022)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-					Kondisi Akhir Tahun (2027)
						Tahun ke-1 (2023)	Tahun ke-2 (2024)	Tahun ke-3 (2025)	Tahun ke-4 (2026)	Tahun ke-5 (2027)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				oleh Provinsi							
				Nilai indeks pencemaran sungai lintas kab/kota	6,28	6,2	6,11	6,03	5,94	5,86	5,86
			Terwujudnya pengelolaan hutan lestari	Peningkatan jumlah produksi sektor kehutanan	n/a	5%	5%	5%	5%	5%	5%
				Persentase Luas lahan kritis yang direhabilitasi di DIY	2,31%	2,52%	3,15%	4,61%	4,82%	5,87%	5,87%
			Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Peringkat Daerah	Kategori Reformasi Birokrasi Peringkat Daerah	BB (80)	BB (80)	A (88,98)	A (88,99)	A (89,00)	A (89,01)	A (89,01)

BAB 5 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Tujuan dan sasaran jangka menengah OPD yang telah ditetapkan tersebut dijabarkan menjadi strategi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY dalam lima tahun sebagai berikut :

1. Melaksanakan perencanaan lingkungan hidup
2. Menyelenggarakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
3. Menyelenggarakan pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
4. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
5. Melaksanakan peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat
6. Membina dan meningkatkan penghargaan lingkungan hidup
7. Melaksanakan penanganan pengaduan lingkungan hidup
8. Melaksanakan pengelolaan persampahan
9. Melaksanakan pengelolaan hutan
10. Melaksanakan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya
11. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan

5.2 Arah Kebijakan

Secara lebih lanjut, strategi yang telah ditetapkan tersebut dijabarkan menjadi arah kebijakan Dinas Lingkungan Hidup DIY dalam lima tahun sebagai berikut :

1. Menyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi
2. Melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) provinsi
3. Mencegah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup

4. Menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
5. Memulihkan lingkungan dari pencemaran dan/atau kerusakan
6. Mengelola keanekaragaman hayati di provinsi
7. Melakukan pengumpulan limbah B3 lintas daerah Kabupaten/Kota
8. Membina dan mengawasi izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Daerah Provinsi
9. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan di tingkat provinsi
10. Memberikan penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah provinsi
11. Menyelesaikan pengaduan masyarakat di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi
12. Menangani sampah di TPA/TPST Regional
13. Melakukan pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi
14. Menyusun rencana pengelolaan KPH
15. Melakukan pemanfaatan hutan di kawasan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung
16. Melaksanakan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara
17. Melaksanakan perlindungan hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
18. Melaksanakan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi <6000 m³/tahun
19. Melakukan perbenihan kehutanan
20. Melakukan pengelolaan Taman Hutan Rakyat (Tahura) Provinsi
21. Mengelola kawasan bernilai ekosistem penting, daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam
22. Melaksanakan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan

Secara terperinci terkait dengan strategi dan arah kebijakan DLHK DIY, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 13 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tercapainya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta terwujudnya pengelolaan hutan lestari	<p>1. Tercapainya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup</p> <p>Indikator: Persentase capaian kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup</p> <p>Metaindikator: Nilai agregasi dari ketercapaian masing - masing program bidang lingkungan hidup</p>	<p>1. Melaksanakan perencanaan lingkungan hidup</p> <p>2. Menyelenggarakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup</p> <p>3. Menyelenggarakan pengelolaan keanekaragaman hayati (Kehati)</p> <p>4. Menyelenggarakan pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)</p> <p>5. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi</p> <p>6. Melaksanakan peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat</p> <p>7. Membina dan meningkatkan penghargaan lingkungan hidup</p> <p>8. Melaksanakan penanganan pengaduan lingkungan hidup</p>	<p>a. Menyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi</p> <p>b. Melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) provinsi</p> <p>c. Mencegah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup</p> <p>d. Menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup</p> <p>e. Memulihkan lingkungan dari pencemaran dan/atau kerusakan</p> <p>f. Mengelola keanekaragaman hayati di provinsi</p> <p>g. Melakukan pengumpulan limbah B3 lintas daerah Kabupaten/Kota</p> <p>h. Membina dan mengawasi izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Daerah Provinsi</p> <p>i. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan di tingkat provinsi</p> <p>j. Memberikan penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah provinsi</p> <p>k. Menyelesaikan pengaduan masyarakat di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi</p> <p>l. Menangani sampah di TPA/TPST Regional</p>

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		9. Melaksanakan pengelolaan persampahan	
	<p>2. Terwujudnya pengelolaan hutan lestari</p> <p>Indikator: Persentase keterwujudan pengelolaan hutan lestari</p> <p>Metaindikator: Nilai agregasi dari ketercapaian masing - masing program bidang kehutanan</p>	<p>1. Melaksanakan pengelolaan hutan</p> <p>2. Melaksanakan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya</p> <p>3. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan</p>	<p>a. Melakukan pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi</p> <p>b. Menyusun rencana pengelolaan KPH</p> <p>c. Melakukan pemanfaatan hutan di kawasan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung</p> <p>d. Melaksanakan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara</p> <p>e. Melaksanakan perlindungan hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</p> <p>f. Melaksanakan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi <6000 m³/tablohun</p> <p>g. Melakukan perbenihan kehutanan</p> <p>h. Melakukan pengelolaan Taman Hutan Rakyat (Tahura) Provinsi</p> <p>i. Mengelola kawasan bernilai ekosistem penting, daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam</p> <p>j. Melaksanakan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan</p>
	<p>3. Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah</p> <p>Indikator: Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah</p> <p>Metaindikator: Capaian Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah pada tahun n</p>	<p>1. Melaksanakan program yang menunjang urusan pemerintah daerah provinsi</p>	<p>a. Melakukan perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p> <p>b. Melakukan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</p> <p>c. Melakukan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>d. Melakukan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p>

BAB 6 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN

Penjabaran terkait dengan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran serta pendanaan indikatif.

Tabel 14 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah DLHK DIY Tahun 2022 – 2027

Keterangan	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Perubahan Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
									Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)						
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Tercapainya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta keterwujudan pengelolaan hutan lestari				Ketercapaian kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta keterwujudan pengelolaan hutan lestari	n/a	n/a		82,35%		85,91%		92,76%		94,33%		100%		100%		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIY	
	serta terwujudnya pengelolaan hutan				Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU	21,43%	21,43%		24,44%		25%		25,34%		25,66%		26,58%		26,58%		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIY	

Keterangan	Tujan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Perubahan Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
							target	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp			
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	lestari				LH yang diterbitkan oleh Provinsi																ana		
					Nilai indeks pencemaran sungai lintas kab/kota	6,28	6,28		6		6,11		6,03		5,94		5,86		5,86				
		Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat	0.00.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95,69	95,69	48.280.419.697	n/a	47.542.308	95,69	53.466.004.723	95,69	52.624.189.198	95,79	54.097.787.744	95,89	55.892.900.983	95,89	263.623.226.956		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIY
				Nilai PKKI Program Penunjang Urusan	94	94		94		n/a		n/a		n/a		n/a		94,24					

Kerangka	Tujan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Perubahan Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Kerangka
							target	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp			
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		Daerah Provinsi			Pemerintah Daerah																		
			0.00.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	n/a	n/a	202.510.750	100%	46.900	100%	199.829.500	100%	134.445.000	100%	141.989.500	100%	156.188.450	100%	679.018.350	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIY	
			0.00.01.1.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	n/a dokumen	n/a dokumen	66.713.000	4 dokumen	18.761.400	4 dokumen	124.879.500	4 dokumen	54.000.000	4 dokumen	56.000.000	4 dokumen	61.600.000		315.240.900	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIY	
		0.00.01.1.01.004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan	n/a dokumen	n/a dokumen	10.402.000	2 dokumen	4.383.200	2 dokumen	4.950.000	2 dokumen	5.445.000	2 dokumen	5.989.500	2 dokumen	6.588.450		27.356.150	Dinas Lingkungan	DIY		

Ker era nga n	Tuj uan	Sasar an	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Dat a Capa ian pada Tahu n Awal Pere ncan aan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Perubahan Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerj a Pera ngka t Daer ah Pen ang g- jawa b	L o k a si	Ket era nga n
							tar get	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		tar get	Rp			
									tar get	Rp	tar get	Rp	tar get	Rp	tar get	Rp	tar get	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
					Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD																n Hid up dan Ke hut ana n		
			0.00. 01.1. 01.00 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	n/a lap ora n	n/a lap ora n	125. 395. 750	22 lapo ran	23.4 21.3 00	22 lapo ran	70.0 00.0 00	22 lapo ran	75.0 00.0 00	22 lapo ran	80.0 00.0 00	22 lapo ran	88.0 00.0 00		336. 421. 300	Din as Lin gku nga n Hid up dan Ke hut ana n	D IY	
			0.00. 01.1. 02	Administra si Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksana nya administra si keuangan perangkat daerah	n/a	n/a	42.2 63.0 99.8 11	100 %	42.8 48.1 06.7 94	100 %	44.7 50.8 42.5 50	100 %	45.8 69.3 85.8 19	100 %	47.0 19.8 66.4 65	100 %	48.2 07.1 87.6 27	100 %	228. 695. 389. 255	Din as Lin gku nga n Hid up dan Ke hut ana n	D IY	

Keterangan	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Perubahan Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Peringkat Daerah Penganggungjawab	Lokasi	Keterangan	
							target	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp				
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
			0.00.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	n/a Orang/Bulan	n/a Orang/Bulan	42.1 33.5 99.8 11	369 Oran g/ Bulan	42.7 26.3 66.7 94	369 Oran g/ Bulan	44.6 04.1 22.7 50	369 Oran g/ Bulan	45.7 19.2 25.8 19	369 Oran g/ Bulan	46.8 62.2 06.4 65	369 Oran g/ Bulan	48.0 33.7 61.6 27		227. 945. 683. 455	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	D	IY	
			0.00.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	n/a dokumen	n/a dokumen	100. 440. 000	1 doku men	100. 740. 000	1 doku men	113. 220. 000	1 doku men	114. 160. 000	1 doku men	119. 160. 000	1 doku men	131. 076. 000		578. 356. 000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	D	IY	
			0.00.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	n/a laporan	n/a laporan	2.09 0.00 0	2 lapo ran	3.00 0.00 0	2 lapo ran	3.49 9.80 0	2 lapo ran	4.00 0.00 0	2 lapo ran	4.50 0.00 0	2 lapo ran	4.95 0.00 0		19.9 49.8 00	Dinas Lingkungan Hidup dan	D	IY	

Keterangan	Tujan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Perubahan Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
							target	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp			
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
					Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																Keputusan		
			0.00.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	n/a laporan	n/a laporan	26.970.000	14 laporan	18.000.000	14 laporan	30.000.000	14 laporan	32.000.000	14 laporan	34.000.000	14 laporan	37.400.000		151.400.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Keputusan	DIY	
			0.00.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	n/a	n/a	62.400.000	100%	67.800.000	100%	101.400.000	100%	82.038.000	100%	90.241.800	100%	99.265.900	100%	440.745.700	Dinas Lingkungan Hidup dan Keputusan	DIY	

Keterangan	Tujan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Perubahan Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
							target	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp			
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
																					hutanan		
			0.00.01.1.03.00.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	n/a laporan	n/a laporan	62.400.000	1 laporan	67.800.000	1 laporan	101.400.000	1 laporan	82.038.000	1 laporan	90.241.800	1 laporan	99.265.900		440.745.700	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIY	
			0.00.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	n/a	n/a	718.595.800	100%	502.006.500	100%	1.121.322.134	100%	1.250.660.500	100%	1.312.598.500	100%	1.443.858.300	100%	5.630.445.934	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIY	

Keterangan	Tujan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Perubahan Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Peringkat Daerah Penganggung-jawab	Lokasi	Keterangan
							target	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp			
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
			0.00.01.1.06.00.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	n/a Paket	n/a Paket	42.200	1 Paket	52.900	1 Paket	68.500	1 Paket	57.400	1 Paket	59.300	1 Paket	65.200		303.557.200	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIY	
			0.00.01.1.06.00.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	n/a Paket	n/a Paket	113.984.000	1 Paket	98.400	1 Paket	192.869.600	1 Paket	152.527.000	1 Paket	152.695.000	1 Paket	167.964.500		764.527.900	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIY	
			0.00.01.1.06.00.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	n/a Paket	n/a Paket	152.620.000	1 Paket	75.000	1 Paket	143.956.600	1 Paket	174.063.000	1 Paket	181.407.000	1 Paket	199.547.700		774.004.600	Dinas Lingkungan Hidup dan	DIY	

Keterangan	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Perubahan Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
							target	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp			
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
																					Ke hut anan		
			0.00.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	n/a Paket	n/a Paket	92.264.600	1 Paket	60.000	1 Paket	123.182.000	1 Paket	104.863.000	1 Paket	106.214.000	1 Paket	116.835.400		511.094.400	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIY	
			0.00.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	n/a Dokumen	n/a Dokumen	7.920.000	1 Dokumen	9.710.400	1 Dokumen	9.710.400	1 Dokumen	11.749.500	1 Dokumen	12.924.500	1 Dokumen	14.216.900		58.311.700	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIY	

Keterangan	Tujan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Perubahan Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Peringkat Daerah Penganggung-jawab	Lokasi	Keterangan
							target	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp			
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
			0.00.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	n/a Laporan	n/a Laporan	309.534.000	1 Laporan	205.839.000	1 Laporan	583.030.534	1 Laporan	750.026.000	1 Laporan	800.026.000	1 Laporan	880.028.600		3.21 8.95 0.13 4	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIY	
			0.00.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	n/a	n/a	692.825.400	100% 75.459.100	100% 1.270.114.980	100% 320.106.000	100% 421.046.000	100% 463.150.600	100% 2.549.876.680					100%	2.54 9.87 6.68 0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIY	
			0.00.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	n/a unit	n/a unit	296.433.500	21 unit	21.210.700	21 unit	898.941.280	21 unit	167.660.000	21 unit	293.096.000	21 unit	322.405.600		1.70 3.31 3.58 0	Dinas Lingkungan Hidup dan	DIY	

Keterangan	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Perubahan Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
							target	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp			
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
																					Ke hut anan		
			0.00.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	n/a unit	n/a unit	396.391.900	20 unit	54.248.400	20 unit	371.173.700	20 unit	152.446.000	20 unit	127.950.000	20 unit	140.745.000		846.563.100	Dinas Lingkungan Hidup dan Ke hut anan	D IY	
			0.00.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	n/a	n/a	2.649.211.600	100 %	2.850.760.974	100 %	3.618.700.360	100 %	2.837.973.999	100 %	2.944.743.999	100 %	3.239.218.478	100 %	15.491.397.810	Dinas Lingkungan Hidup dan Ke hut anan	D IY	

Keterangan	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Perubahan Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Peringkat Daerah Penganggung-jawab	Lokasi	Keterangan
							target	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp			
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
			0.00.01.1.08.00.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	n/a laporan	n/a laporan	8.107.000	1 laporan	3.680.000	1 laporan	6.600.000	1 laporan	6.320.000	1 laporan	7.590.000	1 laporan	8.340.000		32.539.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIY	
			0.00.01.1.08.00.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	n/a laporan	n/a laporan	911.534.200	1 laporan	841.334.200	1 laporan	1.268.834.200	1 laporan	818.084.200	1 laporan	823.584.200	1 laporan	905.942.700		4.657.779.500	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIY	
			0.00.01.1.08.00.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	n/a laporan	n/a laporan	1.729.570.400	1 laporan	2.005.746.774	1 laporan	2.343.266.160	1 laporan	2.013.569.799	1 laporan	2.113.569.799	1 laporan	2.324.926.778		10.801.079.310	Dinas Lingkungan Hidup dan	DIY	

Keterangan	Tujan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Perubahan Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
							target	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp			
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
																					Keputusan		
			0.00.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	n/a	n/a	1.69 1.77 6.33 6	100 % 1.15 1.64 5.04 0	100 % 2.40 3.79 5.19 9	100 % 2.12 9.57 9.88 0	100 % 2.16 7.30 1.48 0	100 % 2.28 4.03 1.62 8	100 % 10.1 36.3 53.2 27	100 % 105. 152. 600						Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIY	
			0.00.01.1.09.00.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	n/a unit	n/a unit	17.5 62.0 00	1 unit 18.4 36.3 00	1 unit 20.4 11.3 00	1 unit 21.0 50.0 00	1 unit 21.5 50.0 00	1 unit 23.7 05.0 00	105. 152. 600						Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIY		

Keterangan	Tujan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Perubahan Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
							Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp	target	Rp			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
			0.00.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	n/a unit	n/a unit	866.480.420	259 unit	614.840.440	259 unit	1.041.712.820	259 unit	1.054.426.680	259 unit	1.064.266.680	259 unit	1.070.693.348		4.845.939.968	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIY	
			0.00.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	n/a unit	n/a unit	255.278.486	255 unit	213.368.300	255 unit	348.624.000	255 unit	359.103.200	255 unit	381.484.800	255 unit	419.633.280		1.722.213.580	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIY	
			0.00.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/	n/a unit	n/a unit	552.455.430	4 unit	305.000.000	4 unit	993.047.079	4 unit	695.000.000	4 unit	700.000.000	4 unit	770.000.000		3.463.047.079	Dinas Lingkungan Hidup	DIY	

Keterangan	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Perubahan Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
							target	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp			
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
			2.11.02.1.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Terlaksananya penyusunan muatan RPPLH Provinsi	1 dokumen	1 dokumen	0	2 dokumen	85.000.000	3 dokumen	303.279.700	0	90.100.000	0	0	0	0	3 dokumen	478.379.700	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	D	IY
			2.11.02.1.01.01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi	Jumlah muatan Hasil Penyusunan dan penetapan RPPLH Provinsi yang Disusun	n/a dokumen	n/a dokumen	0	1 dokumen	85.000.000	1 dokumen	303.279.700	0	0	0	0	0	0	2 dokumen	388.279.700	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	D	IY
			2.11.02.1.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Terlaksananya penyusunan KLHS Provinsi	n/a	n/a	0	2 dokumen	132.268.400	0	96.720.300	0	0	0	0	3 dokumen	159.900.000	3 dokumen	388.888.700	Dinas Lingkungan Hidup dan	D	IY

Keterangan	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Perubahan Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
							target	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp			
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
																					Ke hut anan		
			2.11.02.1.02.01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Provinsi yang Terintegrasi dengan Perencanaan Darat dan Laut yang Disusun	n/a dokumen	n/a dokumen	0	1 dokumen	30.261.200	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen		30.261.200	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIY		
			2.11.02.1.02.02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJM Provinsi yang Disusun	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJM Provinsi yang Disusun	n/a dokumen	n/a dokumen	0	1 dokumen	102.007.200	1 dokumen	96.720.300	0 dokumen	0	0 dokumen	0	1 dokumen	159900000	358.627.500	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIY		

Keterangan	Tujan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Perubahan Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan	
							Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)					
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Penyesuaian subkegiatan lama menjadi kegiatan baru			2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup	60%	60%	0	60%	187.007.200	80%	400.000.000	n/a	90.100.000	n/a	250.000.000	100%	159.900.000	100%	1.087.200	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIY	menjadi	
					Persentase capaian kinerja perencanaan lingkungan hidup	n/a	n/a		30%		n/a		n/a		n/a		n/a		30%					
			2.11.02.1.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Terlaksananya penyusunan muatan RPPLH Provinsi	1 dokumen	1 dokumen	0	2 dokumen	85.000.000	3 dokumen	303.279.700	1 dokumen	90.100.000	0	250.000.000	0	0	3 dokumen	728.379.700	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIY		

Kerangka	Tujan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Perubahan Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Kerangka
							target	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp			
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
																					hutanan		
			2.11.02.1.01.0004	Penyusunan RPPLH Provinsi	Jumlah muatan Hasil Penyusunan dan penetapan RPPLH Provinsi yang Disusun	n/a dokumen	n/a dokumen	0	1 dokumen	85.000.000	1 dokumen	303.279.700	1 dokumen	90.100.000	1 dokumen	250.000.000	0 dokumen	0	4 dokumen	728.379.700			
			2.11.02.1.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Terlaksananya penyusunan KLHS Provinsi	n/a	n/a	0	2 dokumen	132.268.400	0	96.720.300	0 dokumen	0	0	0	3 dokumen	159.900.000	3 dokumen	388.888.700	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIY	

Ker era nga n	Tuj uan	Sasa ran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Dat a Capa ian pada Tahu n Awal Pere ncan aan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Perubahan Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerj a Pera ngka t Daer ah Pen ang g- jawa b	L o ka si	Ket era nga n
							tar get	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		tar get	Rp			
									tar get	Rp	tar get	Rp	tar get	Rp	tar get	Rp	tar get	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
			2.11. 02.1. 02.00 07	Penyeleng garaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Provinsi yang Terintegra si dengan Perencana an Darat dan Laut yang Disusun	n/a doku men	n/a doku men	0	1 doku men	30.2 61.2 00	0 doku men	0 doku men	0 doku men	0 doku men	0 doku men	0 doku men	0 doku men		30.2 61.2 00	Din as Lin gku nga n Hid up dan Ke hut ana n	D IY		
			2.11. 02.1. 02.00 02	Pembuata n dan Pelaksana an KLHS RPJPD/RPJ MD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJ MD Provinsi yang Disusun	n/a doku men	n/a doku men	0	1 doku men	102. 007. 200	1 doku men	96.7 20.3 00	0 doku men	0 doku men	0 doku men	1 doku men	159. 900. 000		358. 627. 500	Din as Lin gku nga n Hid up dan Ke hut ana n	D IY		

Keterangan	Tujan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Perubahan Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan	
							Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)					
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Penyesuaian subkegiatan lama menjadi kegiatan baru			2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Jumlah sumber pencemar yang ditangani	n/a	n/a	2.17 4.91 5.99 0	0,60 %	1.70 3.85 6.60 0	1,70 %	5.05 3.42 9.30 0	2,80 %	2.71 3.54 8.20 0	3,90 %	3.36 7.39 1.40 0	5,10 %	3.73 2.75 0.68 0	5,10 %	16.5 70.9 76.1 80	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIY	semula	
					Peningkatan kemampuan pelayanan pengujian kualitas lingkungan	9500 parameter uji	9500 parameter uji		13000 parameter uji		15200 parameter uji		17800 parameter uji		20830 parameter uji		24370 parameter uji		91200 parameter uji					
					Persentase pemenuhan data kualitas lingkungan hidup dan sumber pencemaran dan/atau	n/a	n/a		100%		n/a		n/a		n/a		n/a		100%					

Ker era nga n	Tuj uan	Sasa ran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (<i>outcome</i>), Kegiatan (<i>output</i>), dan subkegiatan	Dat a Capa ian pada Tahu n Awal Pere ncan aan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Perubahan Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerj a Pera ngka t Daer ah Pen angg ung- jawa b	L o k a si	Ket era nga n
							Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)				
							tar get	Rp	tar get	Rp	tar get	Rp	tar get	Rp	tar get	Rp	tar get	Rp	tar get	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
					kerusakan lingkungan hidup yang dihentikan																		
			2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Tersedianya data kualitas lingkungan hidup dan pengendalian iklim	n/a	n/a	2.17 4.91 5.99 0	6 doku men	1.31 0.26 6.30 0	8 doku men	4.62 0.48 0.00 0	8 doku men	2.23 7.30 4.00 0	8 doku men	2.84 3.52 2.80 0	8 doku men	3.15 6.49 5.18 0	38 doku men	14.1 68.0 68.2 80	Din as Lin gku nga n Hid up dan Ke hut ana n	D IY	

Kerangka	Tujan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Perubahan Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Kerangka
							target	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp			
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
			2.11.03.1.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	n/a dokumen	n/a dokumen	947.486.750	2 dokumen	145.516.900	4 dokumen	228.360.000	4 dokumen	261.196.000	4 dokumen	277.614.000	4 dokumen	294.032.000	18 dokumen	1.206.718.900	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	D IY	
			2.11.03.1.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan	n/a dokumen	n/a dokumen	0	2 dokumen	60.000.000	2 dokumen	125.280.000	2 dokumen	133.308.000	2 dokumen	146.638.800	2 dokumen	160.302.680	10 dokumen	625.529.480	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	D IY	

Kerangka	Tujan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Perubahan Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Peringkat Daerah Penganggung-jawab	Lokasi	Kerangka
							target	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp			
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
			2.11.03.1.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	n/a dokumen	n/a dokumen	1.22 7.42 9.24 0	2 doku men	1.10 4.74 9.40 0	2 doku men	4.26 6.84 0.00 0	2 doku men	1.84 2.80 0.00 0	2 doku men	2.41 9.27 0.00 0	2 doku men	2.70 2.16 0.50 0	2 doku men	12.3 35.8 19.9 00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	D	IY
			2.11.03.1.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Sumber Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dipantau	n/a	n/a	0	50 titik	393.590.300	50 titik	432.949.300	50 titik	476.244.200	50 titik	523.868.600	50 titik	576.255.500	50 titik	11.9 95.7 19.9 00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	D	IY
			2.11.03.1.02.03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	n/a titik	n/a titik	0	50 titik	393.590.300	50 titik	432.949.300	50 titik	476.244.200	50 titik	523.868.600	50 titik	576.255.500	50 titik	11.9 95.7 19.9 00	Dinas Lingkungan Hidup dan	D	IY

Keterangan	Tujan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Perubahan Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan	
							Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)					
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Penyesuaian subkegiatan lama menjadi kegiatan baru			2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Jumlah sumber pencemar yang ditangani	n/a	n/a	2.17 4.91 5.99 0	0,60 %	1.70 3.85 6.60 0	1,70 %	5.05 3.42 9.30 0	2,80 %	2.71 3.54 8.20 0	3,90 %	3.36 7.39 1.40 0	5,10 %	3.73 2.75 0.68 0	5,10 %	16.5 70.9 76.1 80	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIY	menjadi	
					Peningkatan kemampuan pelayanan pengujian kualitas lingkungan	9500 parameter uji	9500 parameter uji		13000 parameter uji		15200 parameter uji		17800 parameter uji		20830 parameter uji		24370 parameter uji		91200 parameter uji					

Keterangan	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Perubahan Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
							target	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp			
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
					Persentase pemenuhan data kualitas lingkungan hidup dan sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dihentikan	n/a	n/a		100 %		n/a		n/a		n/a		n/a		100 %				
			2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Tersedianya data kualitas lingkungan hidup dan pengendalian iklim	n/a	n/a	2.174.915.990	6 dokumen	1.310.266.300	8 dokumen	4.620.480.000	8 dokumen	2.237.304.000	8 dokumen	2.843.522.800	8 dokumen	3.156.495.180	38 dokumen	14.168.068.280	Dinas Lingkungan Hidup dan Kesehatan	DIY	

Kerangka	Tujan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Perubahan Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Kerangka
							Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)				
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
			2.11.03.1.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	n/a dokumen	n/a dokumen	947.486.750	2 dokumen	145.516.900	4 dokumen	228.360.000	4 dokumen	261.196.000	4 dokumen	277.614.000	4 dokumen	294.032.000	18 dokumen	1.206.718.900	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	D IY	
			2.11.03.1.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan	n/a dokumen	n/a dokumen	0	2 dokumen	60.000.000	2 dokumen	125.280.000	2 dokumen	133.308.000	2 dokumen	146.638.800	2 dokumen	160.302.680	2 dokumen	625.529.480	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	D IY	

Keterangan	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Perubahan Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Peringkat Daerah Penganggungjawab	Lokasi	Keterangan
							target	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp			
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
			2.11.03.1.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	n/a dokum en	n/a dokum en	1.227.429.240	13000	1.104.749.400	15200	4.266.840.000	17800	1.752.700.000	20830	2.169.270.000	24370	2.702.160.500	91200	11.995.719.900	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	D	IY
			2.11.03.1.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Sumber Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dipantau	n/a	n/a	0	50 titik	393.590.300	50 titik	432.949.300	50 titik	476.244.200	50 titik	523.868.600	50 titik	576.255.500	50 titik	2.402.907.900	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	D	IY
			2.11.03.1.02.03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	n/a titik	n/a titik	0	50 titik	393.590.300	50 titik	432.949.300	50 titik	476.244.200	50 titik	523.868.600	50 titik	576.255.500	50 titik	2.402.907.900	Dinas Lingkungan Hidup dan	D	IY

Keterangan	Tujan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Perubahan Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
							target	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp			
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
																					Ke hut anan		
			2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase fasilitasi rincian teknis penyimpanan limbah B3 dan persetujuan teknis pengumpulan limbah B3 lintas kab/kota dalam satu provinsi	n/a	n/a	0	100 %	13.258.000	100 %	120.000.000	100 %	94.853.000	100 %	73.680.500	100 %	43.284.000	100 %	345.075.500	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIY	
					Persentase capaian kinerja fasilitasi persetujuan teknis pengelolaan limbah B3	n/a	n/a		100 %		n/a		n/a		n/a		n/a		100 %				

Keterangan	Tujan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Perubahan Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
							target	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp			
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
			2.11.05.1.01	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten /Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya fasilitasi pemenuhan komitmen izin pengumpulan limbah B3	n/a	n/a	0	1 doku men	13.258.000	2 doku men	120.000	3 doku men	94.800	4 doku men	73.600	5 doku men	43.200	5 doku men	345.075.500	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIY	
			2.11.05.1.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten /Kota Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/izin Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten /Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	n/a dokumen	n/a dokumen	0	1 doku men	13.258.000	1 doku men	120.000	1 doku men	94.800	1 doku men	73.600	1 doku men	43.200	5 doku men	345.075.500	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIY	

Keterangan	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Perubahan Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penganggung-jawab	Lokasi	Keterangan
							target	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp			
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
			2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase terawasanya usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Provinsi	n/a	n/a	285.151.000	48,6 5%	160.252.200	75,6 8%	446.260.000	78,9 2%	355.100.000	82,1 6%	372.000.000	85,4 1%	383.290.000	85,4 1%	2.00 2.05 3.20 0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Diy	semula
					Persentase kinerja pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup	n/a	n/a		87,5 0%		n/a		n/a		n/a		n/a		87,5 0%				

Keterangan	Tujan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Perubahan Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
							Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)				
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
			2.11.06.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Terlaksananya pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	n/a	n/a	285.151.000	90 usaha/kegiatan	160.252.200	140 usaha/kegiatan	446.260.000	146 usaha/kegiatan	355.100.000	152 usaha/kegiatan	372.000.000	158 usaha/kegiatan	383.290.000	158 usaha/kegiatan	1.716.902.200	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIY	
			2.11.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan	n/a dokumen	n/a dokumen	192.360.000	1 dokumen	85.264.000	1 dokumen	195.860.000	1 dokumen	97.500.000	1 dokumen	98.560.000	1 dokumen	101.250.000	5 dokumen	578.434.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIY	

Keterangan	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Perubahan Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Peringkat Daerah Penganggung-jawab	Lokasi	Keterangan
							target	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp			
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
			2.11.06.1.01.02	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah ASN yang Dilakukan Pelatihan peningkatan Kapasitas PPLHD dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD	n/a orang	n/a orang	0	20 orang	14.425.700	32 orang	86.000.000	33 orang	88.000.000	34 orang	90.000.000	35 orang	92.000.000	35 orang	370.425.700	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIY	
			2.11.06.1.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi	n/a laporan	n/a laporan	92.791.000	1 laporan	60.562.500	1 laporan	164.400.000	146	169.600.000	152	183.440.000	158	190.040.000	158	768.042.500	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIY	

Keterangan	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Perubahan Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
							Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)				
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
			2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase terawasanya usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Provinsi	n/a	n/a	285.151.000	48,6 5%	160.252.200	75,6 8%	446.260.000	78,9 2%	355.100.000	82,1 6%	372.000.000	85,4 1%	383.290.000	85,4 1%	2.00 2.05 3.20 0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIY	Menda
					Persentase kinerja pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup	n/a	n/a		87,5 0%		n/a		n/a		n/a		n/a		87,5 0%				

Keterangan	Tujan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Perubahan Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
							Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)				
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
			2.11.06.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Terlaksananya pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	n/a	n/a	285.151.000	90 usaha/kegiatan	160.252.200	140 usaha/kegiatan	446.260.000	146 usaha/kegiatan	355.100.000	152 usaha/kegiatan	372.000.000	158 usaha/kegiatan	383.290.000	158 usaha/kegiatan	1.716.902.200	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIY	
			2.11.01.00.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan	n/a dokumen	n/a dokumen	192.360.000	1 dokumen	85.264.000	1 dokumen	195.860.000	1 dokumen	97.500.000	1 dokumen	98.560.000	1 dokumen	101.250.000	5 dokumen	578.434.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIY	

Keterangan	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Perubahan Renstra Peringkat Daerah		Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
							Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)								
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
			2.11.06.1.01.0005	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	n/a orang	n/a orang	0	20 orang	14.425.700	32 orang	86.000	33 orang	88.000	34 orang	90.000	35 orang	92.000	35 orang	370.425.700	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIY	

Ker era nga n	Tuj uan	Sasa ran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (<i>outcome</i>), Kegiatan (<i>output</i>), dan subkegiatan	Dat a Capa ian pada Tahu n Awal Pere ncan aan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Perubahan Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerj a Pera ngka t Daer ah Pen gung - jawa b	L o k a si	Ket era nga n
									Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)						
							tar get	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
			2.11. 06.1. 01.00 09	Pengawasan Perizinan Berusaha dan Persetujua n Pemerinta h terkait Persetujua n Lingkunga n yang diterbitkan oleh Pemerinta h Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang -undangan di bidang Perlindung an dan Pengelolaa n Lingkunga n Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	n/a lap ora n	n/a lap ora n	9279 1000	1 lapo ran	60.5 62.5 00	1 lapo ran	164. 400. 000	146	169. 600. 000	152	183. 440. 000	158	190. 040. 000	158	764. 964. 500	Din as Lin gku nga n Hid up dan Ke hut ana n	D IY	

Ker era nga n	Tuj uan	Sasar an	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (<i>outcome</i>), Kegiatan (<i>output</i>), dan subkegiatan	Dat a Capa ian pada Tahu n Awal Pere ncan aan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Perubahan Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerj a Pera ngka t Daer ah Pen ang g- jawa b	L o k a si	Ket era nga n
							Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		targ et	Rp	targ et	Rp			
							targ et	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
			2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Jumlah Lembaga/ Kelompok Masyarakat/ Institusi terkait PPLH yang Meningkat Kapasitasnya	n/a	n/a	0	16%	152.242.000	34%	120.831.000	54%	130.622.500	76%	154.000.000	100%	207.269.000	100%	764.964.500	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIY	semula
					Persentase capaian kinerja pendidikan , pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	n/a	n/a		21,05%		n/a		n/a		n/a		n/a		21,05%				

Kerangka	Tujan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Perubahan Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja	Lokasi	Kerangka
							target	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp			
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
			2.11.08.1.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya pembinaan kelompok masyarakat	n/a	n/a	0	40 entitas	152.242.000	85 entitas	120.831.000	135 entitas	130.622.500	190 entitas	154.000.000	250 entitas	207.269.000	250 entitas	764.964.500	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIY	
			2.11.08.1.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan	Jumlah Lembaga/Kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya terkait PPLH	n/a	n/a	0	40 lembaga	152.242.000	45 lembaga	120.831.000	50 lembaga	130.622.500	55 lembaga	154.000.000	60 lembaga	207.269.000	250 lembaga	764.964.500	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIY	

Ker era nga n	Tuj uan	Sasar an	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (<i>outcome</i>), Kegiatan (<i>output</i>), dan subkegiatan	Dat a Capa ian pada Tahu n Awal Pere ncan aan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Perubahan Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerj a Pera ngka t Daer ah Pen ang g- jawa b	L o k a si	Ket era nga n
							Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		targ et	Rp	targ et	Rp			
							targ et	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
			2.11. 08	PROGRAM PENINGK ATAN PENDIDIK AN, PELATIHA N DAN PENYULUH AN LINGKUNG AN HIDUP UNTUK MASYARA KAT	Persentase Jumlah Lembaga/ Kelompok Masyaraka t/Institusi terkait PPLH yang Meningkat Kapasitasn ya	n/a	n/a	0	16%	152. 242. 000	34%	120. 831. 000	54%	130. 622. 500	76%	154. 000. 000	100 %	207. 269. 000	100 %	764. 964. 500	Din as Lin gku nga n Hid up da n Ke hut ana n	D IY	me nja di
					Persentase capaian kinerja pendidikan , pelatihan dan penyuluha n lingkungan hidup	n/a	n/a		21,0 5%		n/a		n/a		n/a		n/a		21,0 5%				

Keterangan	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Perubahan Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
							Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)				
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
			2.11.08.1.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya pembinaan kelompok masyarakat	n/a	n/a	0	40 entitas	152.242.000	85 entitas	120.831.000	135 entitas	130.622.500	190 entitas	154.000.000	250 entitas	207.269.000	250 entitas	764.964.500	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIY	

Keterangan	Tujan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Perubahan Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
							Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)				
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
			2.11.08.1.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkatkan kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	n/a lem baga	n/a lem baga	0	40 lem baga	152.242.000	45 lem baga	120.831.000	50 lem baga	130.622.500	55 lem baga	154.000.000	60 lem baga	207.269.000	250 lem baga	764.964.500	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIY	
			2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase entitas yang diusulkan mendapatkan penghargaan tingkat nasional	16.67%	16.67%	452.009.000	16.67%	185.648.500	35%	173.252.900	55%	140.680.000	76.67%	180.252.900	100%	150.400.000	100%	1.282.243.300	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIY	

Ker era nga n	Tuj uan	Sasar an	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (<i>outcome</i>), Kegiatan (<i>output</i>), dan subkegiatan	Dat a Capa ian pada Tahu n Awal Pere ncan aan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Perubahan Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerj a Pera ngka t Daer ah Pen angg ung- jawa b	L o k a si	Ket era nga n
									Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)						
							tar get	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
					Persentase capaian kinerja pengharga an lingkungan hidup	n/a	n/a		100 %		n/a		n/a		n/a		n/a		100 %				
			2.11. 09.1. 01	Pemberian Pengharga an Lingkunga n Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksana nya Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan / Filantropi dalam Perlindung an dan Pengelolaa n Lingkunga n Hidup	19 enti tas	19 enti tas	452. 009. 000	19 entit as	185. 648. 500	44 entit as	173. 252. 900	69 entit as	140. 680. 000	94 entit as	180. 252. 900	119 entit as	150. 400. 000	119 entit as	830. 234. 300	Din as Lin gku nga n Hid up dan Ke hut ana n	D IY	

Keterangan	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Perubahan Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penganggung-jawab	Lokasi	Keterangan
							target	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp			
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
			2.11.09.1.01.001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan / Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan /Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	n/a	n/a	452.009.000	25 entitas	185.648.500	25 entitas	173.252.900	25 entitas	140.680.000	25 entitas	180.252.900	25 entitas	150.400.000	25 entitas	830.234.300	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIY	
			2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase jumlah aduan yang selesai dilayani (%)	n/a	n/a	0	100%	27.227.800	100%	105.000.000	100%	77.000.000	100%	105.000.000	100%	117.000.000	100%	431.227.800	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIY	semula

Keterangan	Tujan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Perubahan Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
							target	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp			
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
			2.11.10.1.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Terlaksananya pelayanan aduan kasus lingkungan hidup	n/a	n/a	0	100 %	27.200	100 %	105.000	100 %	77.000	100 %	105.000	100 %	117.000	100 %	431.227.800	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
			2.11.10.1.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	Jumlah Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi yang Ditindaklanjuti/Ditangani	n/a dokumen	n/a dokumen	0	1 dokumen	27.200	1 dokumen	105.000	2 aduan	77.000	2 aduan	105.000	2 aduan	117.000	6 aduan	431.227.800	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIY	
			2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase jumlah aduan yang selesai dilayani (%)	n/a	n/a	0	100 %	27.200	100 %	105.000	100 %	77.000	100 %	105.000	100 %	117.000	100 %	431.227.800	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		menjadi

Kerangka	Tujan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Perubahan Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Kerangka
							target	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp			
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
																					n		
			2.11.10.1.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Terlaksananya pelayanan aduan kasus lingkungan hidup	n/a	n/a	0	100%	27.227.800	100%	105.000.000	100%	77.000.000	100%	105.000.000	100%	117.000.000	100%	431.227.800	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIY	
			2.11.10.1.01.009	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang dikelola ditindakan	n/a dokumen	n/a dokumen	0	1 dokumen	27.227.800	1 dokumen	105.000.000	2 aduan	77.000.000	2 aduan	105.000.000	2 aduan	117.000.000	6 aduan	431.227.800	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIY	

Kerangka	Tujan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Perubahan Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Kerangka			
								Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)								
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
					juti/ditangani																			
			2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Terlaksananya penanganan sampah di TPA Regional	100%	100%	28.520.338.278	100%	38.363.999.200	100%	48.916.004.100	100%	40.258.716.882	100%	59.010.807.195	100%	60.391.887.915	100%	246.941.415.292	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIY	semula	
					Persentase sampah yang terkelola dan ketersediaan alat berat pengelola sampah	85,71%	85,71%		92,86%		n/a		n/a		n/a		n/a		92,86%					

Keterangan	Tujan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Perubahan Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
							target	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp			
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
					yang beroperasi (%)																		
			2.11.11.1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Terlaksananya penanganannya sampah di TPA Regional	100%	100%	28.520.338.278	100%	38.363.999.200	100%	48.916.004.100	100%	40.258.716.882	100%	59.010.807.195	100%	60.391.887.915	100%	275.461.753.570	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIY	
			2.11.11.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional yang Disusun dan Ditetapkan	n/a dokumen	n/a dokumen	196.749.000	0 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	66.901.250	1 dokumen	69.810.000	1 dokumen	76.791.000	3 dokumen	213.502.250	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIY	

Keterangan	Tujan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Perubahan Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Peringkat Daerah Penganggung-jawab	Lokasi	Keterangan
							target	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp			
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
			2.11.11.1.01.02	Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional	Jumlah Sampah dan Residu yang Terproses akhir di TPA/TPST Regional	n/a ton	n/a ton	0	750 ton	23.038.947.000	350 ton	24.254.000.000	350 ton	27.500.000.000	600 ton	45.000.000.000	600 ton	45.000.000.000	600 ton	164.792.947.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kesehatan	D	IY
			2.11.11.1.01.03	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	Jumlah Fasilitas TPA/TPST Regional yang Beroperasi dan Terpelihara dengan baik	n/a unit	n/a unit	28.159.654.278	12 unit	12.585.518.000	13 unit	24.339.725.800	13 unit	12.000.000.000	13 unit	13.200.000.000	13 unit	14.520.000.000	13 unit	76.645.243.800	Dinas Lingkungan Hidup dan Kesehatan	D	IY
			2.11.11.1.01.06	Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah Volume Sampah dari Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST	n/a	n/a	0	750 ton	406.459.200	350 ton	235.867.200	350 ton	491.815.632	600 ton	540.997.195	600 ton	595.096.915	600 ton	2.270.236.142	Dinas Lingkungan Hidup dan	D	IY

Keterangan	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Perubahan Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
							target	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp			
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
					Regional yang Ditetapkan																Ke hut anan		
			2.11.11.1.01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan sampah di TPA/TPST Regional yang Tersedia	n/a unit	n/a unit	163.935.000	3 unit	2.333.075.000	3 unit	86.411.100	3 unit	200.000.000	3 unit	200.000.000	3 unit	200.000.000	3 unit	3.183.421.100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIY	
			2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Terlaksananya penanganan sampah di TPA Regional	100 %	100 %	28.520.378	100 %	38.363.999.200	100 %	48.916.004.100	100 %	40.258.716.882	100 %	59.010.807.195	100 %	60.391.887.915	100 %	275.461.753.570	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIY	menjadi

Keterangan	Tujan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Perubahan Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
							target	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp			
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
					Persentase sampah yang terkelola dan ketersediaan alat berat pengelola sampah yang beroperasi (%)	85,71 %	85,71 %		92,86 %		n/a		n/a		n/a		n/a		92,86 %				
			2.11.11.1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Terlaksananya penanganannya sampah di TPA Regional	100 %	100 %	28.520.378	100 %	38.363.999.200	100 %	48.916.004.100	100 %	40.258.716.882	100 %	59.010.807.195	100 %	60.391.887.915	100 %	246.941.415.292	Dinas Lingkungan Hidup dan Kesehatan	DIY	
			2.11.11.1.01.0009	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaa n Sampah Provinsi	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaa n sampah provinsi	n/a dokumen	n/a dokumen	196749000	0 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	66.901.250	1 dokumen	69.810.000	1 dokumen	76.791.000	3 dokumen	213.502.250	Dinas Lingkungan Hidup dan	DIY	

Keterangan	Tujan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Perubahan Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
							target	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp			
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
					yang disusun dan ditetapkan																Ke hut anan		
			2.11.11.1.01.0002	Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional	Jumlah Sampah dan Residu yang Terproses akhir di TPA/TPST Regional	n/a ton	n/a ton	0	750 ton	23.038.947.000	350 ton	24.254.000.000	350 ton	27.500.000.000	600 ton	45.000.000.000	600 ton	45.000.000.000		164.792.947.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kesehatan	DIY	
			2.11.11.1.01.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	Jumlah Fasilitas TPA/TPST Regional yang Beroperasi dan Terpelihara dengan baik	n/a unit	n/a unit	28.159.654.278	12 unit	12.585.518.000	13 unit	24.339.725.800	13 unit	12.000.000.000	13 unit	13.200.000.000	13 unit	14.520.000.000		76.645.243.800	Dinas Lingkungan Hidup dan Kesehatan	DIY	

Keterangan	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Perubahan Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
							target	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp			
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
			2.11.11.1.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan sampah di TPA/TPST Regional yang Tersedia	n/a unit	n/a unit	163.935.000	3 unit	2.333.075.000	3 unit	86.411.100	3 unit	200.000.000	3 unit	200.000.000	3 unit	200.000.000		3.019.486.100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIY	
			2.11.11.1.01.0017	Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah tonase Sampah yang ditangani dari Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Dilaksanakan	n/a	n/a	0	750 ton	406.459.200	350 ton	235.867.200	350 ton	491.815.632	600 ton	540.997.195	600 ton	595.096.915	600 ton	2.270.236.142	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIY	
		Terwujudnya pengelolaan hutan			Peningkatan jumlah produksi sektor kehutanan	n/a	n/a		5%		5%		5%		5%		5%		5%		Dinas Lingkungan Hidup		

Keterangan	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Perubahan Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Peringkat Daerah Penganggung-jawab	Lokasi	Keterangan
							target	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp			
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		n lestari																			up da n Ke hut ana n		
				PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Penambahan luas tutupan vegetasi di Satuan Ruang Strategis	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	10 ha	90.000.000	10 ha	500.000.000	15 ha	3.350.000	15 ha	3.350.000	50 ha	7.290.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DY	Se mula
				Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1 Dokumen	90.000	1 Dokumen	500.000	1 Dokumen	3.350.000	1 Dokumen	3.350.000	4 Dokumen	7.290.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DY	

Keterangan	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Perubahan Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Peringkat Daerah Penganggung-jawab	Lokasi	Keterangan
							target	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp			
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1 Dokumen	90.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	3.000.000	1 Dokumen	3.000.000	4 Dokumen	6.240.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIY	
				Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	n/a	n/a	n/a	n/a	0	n/a	0	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	3 Dokumen	600.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIY	
				Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi	n/a	n/a	n/a	n/a	0	n/a	0	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	3 Dokumen	450.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan	DIY	

Keterangan	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Perubahan Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
							Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)				
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
																					Keputusan		
			2.10.11	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	Persentase capaian tahapan produk hukum kekhususan pengelolaan hutan Yogyakarta	57%	57%	285.000.000	71%	199.640.000	85%	447.355.000	100%	500.000.000	n/a	0	n/a	0	85%	1.146.995.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIY	
					Jumlah dokumen penyelenggaraan keistimewaan urusan tata ruang	30 dokumen	30 dokumen		30 dokumen		n/a		n/a		n/a		n/a		30 dokumen				

Kerangka	Tujan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Perubahan Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Kerangka
							target	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp			
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
			2.10.11.5.01	Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Terlaksananya pengelolaan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten yang meliputi Aspek Penatausahaan, Aspek Pemeliharaan Dokumen, Aspek Pengawasan	1 laporan	1 laporan	285.000.000	1 laporan	199.640.000	1 laporan	447.355.000	n/a	500.000.000	n/a	0	n/a	0	3 laporan	1.146.990	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIY	
			2.10.11.5.01.01	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten Dalam Rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial,	3 dokumen	3 dokumen	285.000.000	1 dokumen	199.640.000	1 dokumen	447.355.000	1 dokumen	500.000.000	n/a dokumen	0	n/a dokumen	0		1.146.990	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIY	

Keterangan	Tujan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Perubahan Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
							target	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp			
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
					Dan Kesejahteraan Masyarakat																		
			2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Rata-rata persentase penerapan jogja hijau di tingkat kalurahan/ kelurahan dan persentase pengelolaan hutan khusus Yogyakarta	n/a	n/a	3.30 3.42 4.75 0	0,23 %	8.14 7.25 0.00 0	0,45 %	2.75 6.25 5.00 0	1,37 %	7.94 3.20 0.00 0	24,9 2%	5.10 0.00 0.00 0	30,1 4%	5.20 0.00 0.00 0	30,1 4%	29.1 46.7 05.0 00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIY	
					Jumlah budaya benda dan tidak benda yang dikelola dan	7 entitas	7 entitas		7 entitas		n/a		n/a		n/a		n/a		7 entitas				

Kerangka	Tujan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Perubahan Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Kerangka
							target	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp			
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
					dilestarikan																		
			2.22.08.5.01	Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman	Jumlah objek sejarah, bahasa, sastra dan museum yang dikelola (objek)	n/a	n/a	0	1	98.000.000	1	98.500.000	1	600.000.000	1	650.000.000	1	700.000.000	1	2.146.500.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DY	
			2.22.08.5.01.03	Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman	Jumlah Permuseuman yang Dibina dan Dikelola	0 unit	0 unit	0	1 unit	98.000.000	1 unit	98.500.000	1 unit	600.000.000	1 unit	650.000.000	1 unit	700.000.000		2.146.500.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DY	

Keterangan	Tujan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Perubahan Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Peringkat Daerah Penganggung-jawab	Lokasi	Keterangan
							target	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp			
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
			2.22.08.5.06	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Terlaksananya penyediaa n sarana dan prasarana keistimew aan urusan kebudayaa n	100 %	100 %	56.476.000	n/a	0	n/a	0	100 %	3.970.000	n/a	200.000.000	n/a	200.000.000	100 %	4.370.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIY	
			2.22.08.5.06.01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya	4 unit	4 unit	56.476.000	n/a unit	0	n/a unit	0	9 unit	3.970.000	1 unit	200.000.000	1 unit	200.000.000		4.370.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIY	
			2.22.08.5.08	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Terlaksananya Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	100 %	100 %	2.849.948.750	100 %	400.000.000	100 %	507.755.000	100 %	173.200.000	100 %	850.000.000	100 %	900.000.000	100 %	2.830.955.000	Dinas Lingkungan Hidup dan	DIY	

Keterangan	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Perubahan Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
							Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)				
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
																					Ke hut anan		
			2.22.08.5.08.02	Pengembangan Atraksi Wisata Budaya	Jumlah Objek Atraksi Wisata Budaya yang Dikembangkan	2	2	2.849.948.750	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0		2.849.948.750	Dinas Lingkungan Hidup dan Kesehatan	DIY	
			2.22.08.5.08.06	Pengembangan Wana Wisata Budaya Mataram	Jumlah Objek Wana Wisata Budaya Mataram yang Dikembangkan	n/a	n/a	0	2 objek	400.000.000	2 objek	507.755.000	2 objek	173.200.000	2 objek	850.000.000	2 objek	900.000.000		2.830.955.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kesehatan	DIY	

Keterangan	Tujan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Perubahan Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Peringkat Daerah Penganggungjawab	Lokasi	Keterangan
							target	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp			
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
			2.22.08.5.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Jumlah kalurahan/keluarahan yang menerapkan Jogja Hijau	n/a	n/a	397.000.000	2	7.649.250.000	4	2.150.000	6	3.200.000	8	3.400.000	10	3.400.000	10	19.799.250.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIY	
			2.22.08.5.09.09	Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	1 laporan	1 laporan	397.000.000	1 laporan	7.649.250.000	1 laporan	2.150.000	1 laporan	3.200.000	1 laporan	3.400.000	1 laporan	3.400.000		19.799.250.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIY	
			3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan	n/a	n/a	7.093.224.041	79,6	6.687.800.356	80,65	14.511.009.138	91,175	60.766.205.432	81,925	15.922.007.665	82,375	18.424.107.374	82,375	116.311.129.965	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIY	semula

Kerangka	Tujan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Perubahan Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Kerangka
							target	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp			
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
																					n		
					Peningkatan nilai produksi pemanfaatan hutan di luar kawasan	n/a	n/a		5%		5%		5%		5%		5%		5%				
					Persentase usaha perbenihan terdaftar yang telah memiliki izin usaha	78,95%	78,95%		78,95%		84,21%		89,47%		94,74%		100%		100%				
					Persentase lahan kritis yang direhabilitasi	5,86%	5,86%		5,86%		23,53%		45,11%		70,60%		100%		100%				
					Persentase kesesuaian pengelolaan hutan	n/a	n/a		69,33%		n/a		n/a		n/a		n/a		69,33%				

Keterangan	Tujan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Perubahan Renstra Peringkat Daerah		Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan	
							target	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp				
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
			3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Terlaksananya perencanaan pengelolaan KPH	n/a	n/a	0	2 doku men	122.555.400	3 doku men	258.850.000	4 doku men	253.862.500	5 doku men	291.941.875	6 doku men	1.206.236	6 doku men	2.133.441	2.931	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIY	
			3.28.03.1.02.01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	n/a dokumen	n/a dokumen	0	2 doku men	122.555.400	1 doku men	258.850.000	1 doku men	253.862.500	1 doku men	291.941.875	2 doku men	1.206.236		2.133.441	2.931	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIY	
			3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung yang menjadi kewenangan	n/a	n/a	5.368.045.541	15.581 ha	5.313.061.370	15.581 ha	9.228.468.662	15.581 ha	55.671.569.792	15.581 ha	10.290.598.958	15.581 ha	11.476.141.869	15.581 ha	91.979.840.651		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIY	

Keterangan	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Perubahan Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
							target	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp			
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
																					Ke hut anan		
			3.28.03.1.03.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	n/a dokumen	n/a dokumen	0	0 dokumen	0	1 dokumen	49.850.800	1 dokumen	65.000.000	1 dokumen	75.000.000	1 dokumen	85.000.000	5 dokumen	274.850.800	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIY	
			3.28.03.1.03.06	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi yang Disahkan	n/a dokumen	n/a dokumen	0	43 dokumen	15.434.100	43 dokumen	49.875.500	43 dokumen	70.000.000	43 dokumen	90.000.000	43 dokumen	110.000.000	43 dokumen	335.309.600	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIY	

Keterangan	Tujan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Perubahan Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
							target	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp			
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
																					ana n		
			3.28.03.1.03.07	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Lindung yang Disahkan	n/a dokumen	n/a dokumen	0	8 dokumen	3.516.700	8 dokumen	14.390.000	8 dokumen	25.000.000	8 dokumen	35.000.000	8 dokumen	55.000.000	8 dokumen	132.906.700	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIY	
			3.28.03.1.03.08	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	Jumlah Laporan Pemanfaatan hutan di KPH	n/a laporan	n/a laporan	5.368.045.541	1 laporan	4.701.402.370	1 laporan	6.821.210.562	1 laporan	53.178.319.792	1 laporan	7.494.611.458	1 laporan	8.272.006.244	1 laporan	80.467.550.426	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIY	

Keterangan	Tujan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Perubahan Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
							target	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp			
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
			3.28.03.1.03.09	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	n/a	n/a	0	1 laporan	592.708.200	1 laporan	2.293.141.800	1 laporan	2.333.250.000	1 laporan	2.595.987.500	1 laporan	2.954.135.625	1 laporan	10.769.223.125	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIY	
			3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Terlaksananya Rehabilitasi Hutan dan Lahan	n/a	n/a	0	75 ha	457.472.500	226 ha	2.281.657.776	276 ha	2.500.620.000	326 ha	2.688.035.000	376 ha	2.867.335.000	1279 ha	10.795.120.276	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIY	

Keterangan	Tujan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Perubahan Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Peringkat Daerah Penganggung-jawab	Lokasi	Keterangan
							target	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp			
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
			3.28.03.1.04.01	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	n/a dokumen	n/a dokumen	0	2 dokumen	23.341.200	5 dokumen	273.341.000	3 dokumen	216.500.000	3 dokumen	218.500.000	3 dokumen	221.000.000		952.682.200	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	D	IY
			3.28.03.1.04.02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	n/a Ha	n/a Ha	0	75 Ha	195.985.200	200 Ha	524.070.000	200 Ha	524.070.000	250 Ha	562.035.000	250 Ha	562.035.000		2.368.195.200	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	D	IY
			3.28.03.1.04.04	Pembangunan Penghijauan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	n/a Ha	n/a Ha	0	5 Ha	70.594.000	30 Ha	508.000.000	30 Ha	580.000.000	30 Ha	638.000.000	30 Ha	701.800.000		2.498.394.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	D	IY

Keterangan	Tujan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Perubahan Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Peringkat Daerah Penganggung-jawab	Lokasi	Keterangan
							target	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp			
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
			3.28.03.1.04.09	Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan	Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi	n/a ha	n/a ha	0	0 ha	0	1 ha	273.416.550	1 ha	287.000.000	1 ha	301.000.000	1 ha	331.000.000		1.19 2.41 6.55 0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIY	
			3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Terlaksananya perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan produksi	88,03 %	88,03 %	1.140.994.000	90,22 %	641.092.700	92,42 %	2.400.113.600	94,62 %	1.971.887.550	96,95 %	2.254.745.683	97%	2.468.936.285	97%	9.736.775.818	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIY	
			3.28.03.1.05.01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	15581 ha	15581 ha	925.421.000	15581 ha	454.263.100	15581 ha	1.830.650.200	15581 ha	1.426.887.550	15581 ha	1.682.170.683	15581 ha	1.868.246.285		7.262.217.818	Dinas Lingkungan Hidup dan	DIY	

Keterangan	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Perubahan Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
							target	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp			
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
																					Ke hut anan		
			3.28.03.1.05.02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	15581 ha	15581 ha	215.573.000	15581 ha	173.923.200	15581 ha	495.211.000	15581 ha	510.000.000	15581 ha	534.945.000	15581 ha	560.690.000		2.274.769.200	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIY	
			3.28.03.1.05.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	n/a laporan	n/a laporan	0	1 laporan	12.906.400	1 laporan	74.252.400	1 laporan	35.000.000	1 laporan	37.630.000	1 laporan	40.000.000		199.788.800	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIY	

Keterangan	Tujan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Perubahan Renstra Peringkat Daerah		Unit Kerja Peringkat Daerah Penganggung-jawab	Lokasi	Keterangan	
							Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)					
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
			3.28.03.1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Terlaksananya Pendampingan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	n/a	n/a	73.195.000	28 unit manajemen	78.429.286	28 unit manajemen	227.868.000	28 unit manajemen	244.260.000	28 unit manajemen	261.450.000	28 unit manajemen	280.000.000	28 unit manajemen	1.092.006	2.007.286	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIY	
			3.28.03.1.07.01	Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Unit Manajemen yang Melaksanakan Tertib Pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) Skala Usaha Kecil dan Menengah	n/a	n/a	0	0 Unit Manajemen	0	13 Unit Manajemen	65.000.000	18 Unit Manajemen	70.000.000	23 Unit Manajemen	75.000.000	28 Unit Manajemen	80.000.000	28 Unit Manajemen	290.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIY		

Keterangan	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Perubahan Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
							target	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp			
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
			3.28.03.1.07.02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBP (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	n/a dokumen	n/a dokumen	73.195.00	1 dokumen	78.429.286	1 dokumen	162.868.000	1 laporan	174.260.000	1 laporan	186.450.000	1 laporan	200.000.000	3 laporan	802.007.286	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIY	
			3.28.03.1.09	Perbenihan Tanaman Hutan	Terlaksananya fasilitasi sertifikasi Peredaran Benih dan/atau Bibit	100%	100%	510.989.500	100%	75.189.100	100%	114.051.100	100%	124.005.590	100%	135.236.149	100%	125.461.064	100%	573.943.003	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIY	

Ker era nga n	Tuj uan	Sasa ran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Dat a Capa ian pada Tahu n Awal Pere ncan aan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Perubahan Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerj a Pera ngka t Daer ah Pen ang g- ung- jawa b	L o kasi	Ket era nga n
							tar get	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		tar get	Rp			
									tar get	Rp	tar get	Rp	tar get	Rp	tar get	Rp	tar get	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
			3.28. 03.1. 09.02	Sertifikasi Sumber Benih	Jumlah Sertifikat Sumber Benih yang Diterbitkan	n/a sert ifik at	n/a sert ifik at	58.6 70.0 00	1 serti fikat	18.1 32.7 00	1 serti fikat	21.0 50.0 00	1 serti fikat	22.7 40.0 00	1 serti fikat	24.6 50.0 00	1 serti fikat	26.5 25.0 00		113. 097. 700	Din as Lin gku nga n Hid up dan Ke hut ana n	D IY	
			3.28. 03.1. 09.03	Sertifikasi Mutu Benih	Jumlah Sertifikat Mutu Benih yang Diterbitkan	n/a sert ifik at	n/a sert ifik at	0	1 serti fikat	9.67 3.80 0	1 serti fikat	11.8 00.0 00	1 serti fikat	12.6 80.0 00	1 serti fikat	13.7 00.0 00	1 serti fikat	14.8 00.0 00		62.6 53.8 00	Din as Lin gku nga n Hid up dan Ke hut ana n	D IY	
			3.28. 03.1. 09.04	Sertifikasi Mutu Bibit	Jumlah Sertifikat Mutu Bibit yang Diterbitkan	n/a sert ifik at	n/a sert ifik at	16.1 77.0 00	1 serti fikat	12.6 53.4 00	1 serti fikat	13.6 65.0 00	1 serti fikat	14.7 50.0 00	1 serti fikat	16.0 00.0 00	1 serti fikat	17.2 00.0 00		74.2 68.4 00	Din as Lin gku nga n Hid up dan	D IY	

Kerangka	Tujan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Perubahan Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Kerangka
							target	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp			
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
																					Ke hut ana n		
			3.28.03.1.09.05	Pengawasa n Peredaran Benih dan/atau Bibit	Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar	n/a lap ora n	n/a lap ora n	436.142.500	1 lapo ran	16.318.800	1 lapo ran	19.050.000	1 lapo ran	20.500.000	1 lapo ran	22.217.000	1 lapo ran	2.400.000		80.485.800	Din as Lin gku nga n Hid up dan Ke hut ana n	D IY	
			3.28.03.1.09.06	Pembangu nan Sumber Benih	Luas Sumber Benih yang Dibangun	n/a ha	n/a ha	0	5 ha	18.410.400	5 ha	48.486.100	5 ha	53.335.590	5 ha	58.669.149	5 ha	64.536.064		243.437.303	Din as Lin gku nga n Hid up dan Ke hut ana n	D IY	

Keterangan	Tujan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Perubahan Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan	
							target	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp				
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
			3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan	n/a	n/a	7.09 3.22 4.04 1	79,6	6.68 7.80 0.35 6	80,6 5	14.5 11.0 09.1 38	91,1 75	60.7 66.2 05.4 32	81,9 25	15.9 22.0 07.6 65	82,3 75	18.4 24.1 07.3 74	82,3 75	123. 404. 354. 006	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIY	menjadi	
					Peningkatan nilai produksi pemanfaatan hutan di luar kawasan	n/a	n/a		5%		5%		5%		5%		5%		5%					
					Persentase usaha perbenihan terdaftar yang telah memiliki izin usaha	78,95%	78,95%		78,95%		84,21%		89,47%		94,74%		100%		100%					
					Persentase lahan kritis yang direhabilitasi	5,86%	5,86%		5,86%		23,53%		45,11%		70,60%		100%		100%					

Kerangka	Tujan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Perubahan Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Kerangka
							target	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp			
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
					Persentase kesesuaian pengelolaan hutan	n/a	n/a		69,33		n/a		n/a		n/a		n/a		69,33				
			3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Terlaksananya perencanaan pengelolaan KPH	n/a	n/a	0	2 dokumen	122.555.400	3 dokumen	258.850.000	4 dokumen	253.862.500	5 dokumen	291.941.875	6 dokumen	1.206.233.156	6 dokumen	2.133.442.931	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIY	
			3.28.03.1.01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	n/a dokumen	n/a dokumen	0	2 dokumen	122.555.400	1 dokumen	258.850.000	1 dokumen	253.862.500	1 dokumen	291.941.875	2 dokumen	1.206.233.156		2.133.442.931	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIY	

Keterangan	Tujan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Perubahan Renstra Peringkat Daerah		Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
							Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)				
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
			3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung yang menjadi kewenangan	n/a	n/a	5.36 8.04 5.54 1	15.5 81 ha	5.31 3.06 1.37 0	15.5 81 ha	9.22 8.46 8.66 2	15.5 81 ha	55.6 71.5 69.7 92	15.5 81 ha	10.2 90.5 98.9 58	15.5 81 ha	11.4 76.1 41.8 69	15.5 81 ha	97.3 47.8 86.1 92	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIY	
			3.28.03.1.03.001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala								1 laporan	95.0 00.0 00	1 laporan	125. 000. 000	1 laporan	165. 000. 000	1 laporan	385. 000. 000			

Keterangan	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Perubahan Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
							target	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp			
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
			3.28.03.1.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	n/a dokumen	n/a dokumen	0	0 dokumen	0	1 dokumen	49.800	1 dokumen	55.576.592	1 dokumen	55.839.392	1 dokumen	56.197.455.417		167.663.183.301	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIY	
			3.28.03.1.03.0010	Penilaian Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi yang Disahkan															0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIY	
			3.28.03.1.03.0012	Penilaian Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan															0	Dinas Lingkungan Hidup	DIY	

Keterangan	Tujan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Perubahan Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
							target	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp			
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
					Lindung yang Disahkan																up dan Ke hut anan		
			3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Terlaksananya Rehabilitasi Hutan dan Lahan	n/a	n/a	0	75 ha	457.472.500	226 ha	2.281.657.776	276 ha	2.500.620.000	326 ha	2.688.035.000	376 ha	2.867.335.000	1279 ha	10.795.120.276	Dinas Lingkungan Hidup dan Ke hut anan		
			3.28.03.1.04.01	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	n/a dokumen	n/a dokumen	0	2 dokumen	23.341.200	5 dokumen	273.341.000	3 dokumen	216.500.000	3 dokumen	218.500.000	3 dokumen	221.000.000		952.682.200	Dinas Lingkungan Hidup dan Ke hut anan	DIY	

Keterangan	Tujan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Perubahan Renstra Peringkat Daerah		Unit Kerja Peringkat Daerah Penganggung-jawab	Lokasi	Keterangan
							target	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp			
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
			3.28.03.1.04.02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	n/a Ha	n/a Ha	0	75 Ha	195.985.200	200 Ha	524.070.000	200 Ha	524.070.000	250 Ha	562.035.000	250 Ha	562.035.000		2.36 8.19 5.20 0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	D	IY
			3.28.03.1.04.04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	n/a Ha	n/a Ha	0	5 Ha	70.594.000	30 Ha	508.000.000	30 Ha	580.000.000	30 Ha	638.000.000	30 Ha	701.800.000		2.49 8.39 4.00 0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	D	IY
			3.28.03.1.04.0012	Pembangunan Gully Plug	Jumlah Gully Plug yang Terbangun	n/a unit	n/a unit	0	0 unit	0	7 unit	138.000.000	7 unit	158.000.000	7 unit	182.000.000	7 unit	210.000.000	28 unit	688.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan	D	IY

Keterangan	Tujan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Perubahan Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
							Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)				
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
																					Ke hut anan		
			3.28.03.1.04.0009	Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan	Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi	n/aha	n/aha	0	0 ha	0	1 ha	273.416.550	1 ha	287.000.000	1 ha	301.000.000	1 ha	331.000.000		1.19 2.41 6.55 0	Din as Lin gku nga n Hid up dan Ke hut anan	D IY	
			3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Terlaksananya perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan produksi	88,03%	88,03%	1.140.994.000	90,22%	641.092.700	92,42%	2.400.113.600	94,62%	1.971.887.550	96,95%	2.254.743	97%	2.468.936.285	97%	10.877.769.818	Din as Lin gku nga n Hid up dan Ke hut anan		

Keterangan	Tujan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Perubahan Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
							target	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp			
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
			3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli/Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	n/a laporan	n/a laporan	0	1 laporan	12.906.400	1 laporan	74.252.400	1 laporan	35.000.000	1 laporan	37.630.000	1 laporan	40.000.000		199.788.800	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIY	
			3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	15581 ha	15581 ha	1.140.994.000	15581 ha	628.186.300	15581 ha	2.325.861.200	15581 ha	1.936.887.550	15581 ha	2.217.113.568	15581 ha	2.428.936.285		9.536.987.018	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIY	

Keterangan	Tujan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Perubahan Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Peringkat Daerah Penganggung-jawab	Lokasi	Keterangan
							target	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp			
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
			3.28.03.1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Terlaksananya Pendampingan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	n/a	n/a	73.195.000	28 unit manajemen	78.429.286	28 unit manajemen	227.868.000	28 unit manajemen	244.260.000	28 unit manajemen	261.450.000	28 unit manajemen	280.000.000	28 unit manajemen	1.165.202.286	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIY	
			3.28.03.1.07.006	Pemantauan Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH) untuk PBPHH (Kayu dan HHBK) skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Tertib pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) skala usaha kecil dan menengah	n/a	n/a	0	0 Unit Manajemen	0	13 Unit Manajemen	65.000.000	18 Unit Manajemen	70.000.000	23 Unit Manajemen	75.000.000	28 Unit Manajemen	80.000.000	28 Unit Manajemen	290.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIY	

Ker era nga n	Tuj uan	Sasar an	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (<i>outcome</i>), Kegiatan (<i>output</i>), dan subkegiatan	Dat a Capa ian pada Tahu n Awal Pere ncan aan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Perubahan Renstra Peringkat Daerah		Unit Kerj a Pera ngka t Daer ah Pen gung - jawa b	L o kasi	Ket era nga n
									Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)						
							tar get	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
			3.28. 03.1. 07.00 04	Pembinaan dan Pengawasa n PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenang an provinsi	Laporan Kegiatan pelaksanaa n Pengawasa n PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala kecil dan menengah yang menjadi kewenang an provinsi	n/a dok um en	n/a dok um en	73.1 95.0 00	1 doku men	78.4 29.2 86	1 doku men	162. 868. 000	1 lapo ran	174. 260. 000	1 lapo ran	186. 450. 000	1 lapo ran	200. 000. 000	3 lapo ran	802. 007. 286	Din as Lin gku nga n Hid up dan Ke hut ana n	D IY	
			3.28. 03.1. 09	Perbeniha n Tanaman Hutan	Terlaksana nya fasilitasi sertifikasi Peredaran Benih dan/atau Bibit	100 %	100 %	510. 989. 500	100 %	75.1 89.1 00	100 %	114. 051. 100	100 %	124. 005. 590	100 %	135. 236. 149	100 %	125. 461. 064	100 %	1.08 4.93 2.50 3	Din as Lin gku nga n Hid up dan Ke hut ana n	D IY	

Keterangan	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Perubahan Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
							target	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp			
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
			3.28.03.1.09.00.02	Sertifikasi Sumber Benih	Jumlah Sertifikat Sumber Benih yang Diterbitkan	n/a sertifikat	n/a sertifikat	58.670.00	1 sertifikat	18.132.700	1 sertifikat	21.050.00	1 sertifikat	22.740.00	1 sertifikat	24.650.00	1 sertifikat	26.525.00	5 sertifikat	171.767.700	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIY	
			3.28.03.1.09.00.03	Sertifikasi Mutu Benih	Jumlah Sertifikat Mutu Benih yang Diterbitkan	n/a sertifikat	n/a sertifikat	0	1 sertifikat	9.673.800	1 sertifikat	11.800.00	1 sertifikat	12.680.00	1 sertifikat	13.700.00	1 sertifikat	14.800.00	5 sertifikat	62.653.800	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIY	
			3.28.03.1.09.00.04	Sertifikasi Mutu Bibit	Jumlah Sertifikat Mutu Bibit yang Diterbitkan	n/a sertifikat	n/a sertifikat	16.177.00	1 sertifikat	12.653.400	1 sertifikat	13.665.00	1 sertifikat	14.750.00	1 sertifikat	16.000.00	1 sertifikat	17.200.00	5 sertifikat	90.445.400	Dinas Lingkungan Hidup dan	DIY	

Ker era nga n	Tuj uan	Sasa ran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (<i>outcome</i>), Kegiatan (<i>output</i>), dan subkegiatan	Dat a Capa ian pada Tahu n Awal Pere ncan aan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Perubahan Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerj a Pera ngka t Daer ah Pen ang g ung - jawa b	L o k a s i	Ket era nga n
							tar get	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		tar get	Rp			
									tar get	Rp	tar get	Rp	tar get	Rp	tar get	Rp	tar get	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
																					Ke hut ana n		
			3.28. 03.1. 09.00 05	Pengawasa n Peredaran Benih dan/atau Bibit	Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar	n/a lap ora n	n/a lap ora n	436. 142. 500	1 lapo ran	16.3 18.8 00	1 lapo ran	19.0 50.0 00	1 lapo ran	20.5 00.0 00	1 lapo ran	22.2 17.0 00	1 lapo ran	2.40 0.00 0	5 lapo ran	516. 628. 300	Din as Lin gku nga n Hid up dan Ke hut ana n	D IY	
			3.28. 03.1. 09.00 07	Pembuata n dan Pengadaan Bibit untuk Rehabilitas i Lahan	Jumlah bibit berkualitas yang tersedia untuk Rehabilitas i Lahan	n/a bat ang	n/a bat ang	0	1000 00 bata ng	167. 552. 100	4000 00 bata ng	564. 830. 226	4000 00 bata ng	735. 050. 000	4000 00 bata ng	786. 500. 000	4000 00 bata ng	841. 500. 000	1700 000 bata ng	3.09 5.43 2.32 6	Din as Lin gku nga n Hid up dan Ke hut ana n	D IY	

Keterangan	Tujan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Perubahan Renstra Peringkat Daerah		Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
							target	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp			
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
			3.28.03.1.09.0009	Pengelolaan Sumber Benih	Luas sumber benih yang dikelola	n/a ha	n/a ha	0	5 ha	18.410.400	5 ha	48.486.100	5 ha	53.335.590	5 ha	58.669.149	5 ha	64.536.064	5 ha	243.437.303	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIY	
			3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi	n/a	n/a	401.240.000	66 indeks	402.150.400	66 indeks	1.334.200.000	67 indeks	1.344.100.000	68 indeks	1.388.400.000	69 indeks	1.272.600.000	69 indeks	6.142.690.400	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIY	semula
					Nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi	n/a	n/a		68,53		n/a		n/a		n/a		n/a		68,53				

Keterangan	Tujan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Perubahan Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
							target	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp			
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
			3.28.04.1.01	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	Luas hutan konservasi yang dikelola	634,10 ha	634,10 ha	401.240.000	634,10 ha	219.120.900	634,10 ha	822.200.000	634,10 ha	812.100.000	634,10 ha	836.400.000	634,10 ha	700.600.000	634,10 ha	3.791.660.900	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIY	
			3.28.04.1.01.01	Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA	n/a laporan	n/a laporan	401.240.000	1 laporan	94.058.500	1 laporan	314.769.500	634,10 ha	172.600.000	634,10 ha	189.900.000	634,10 ha	208.600.000		408.828.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIY	
			3.28.04.1.01.03	Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi	Luas Kawasan Tahura yang Diinventarisasi dan Diverifikasi Dengan Nilai	n/a ha	n/a ha	0	6 ha	107.649.700	6 ha	270.046.400	6 ha	359.000.000	6 ha	377.000.000	6 ha	396.000.000		377.696.100	Dinas Lingkungan Hidup dan	DIY	

Ker era nga n	Tuj uan	Sasa ran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Dat a Capa ian pada Tahu n Awal Pere ncan aan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Perubahan Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerj a Pera ngka t Daer ah Pen ang gung - jawa b	L o k a si	Ket era nga n
							Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)				
							tar get	Rp	tar get	Rp	tar get	Rp	tar get	Rp	tar get	Rp	tar get	Rp	tar get	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
					Kehati Tinggi																Ke hut ana n		
			3.28. 04.1. 01.08	Penguatan Kapasitas dan Pemberda yaan Masyaraka t di sekitar TAHURA Provinsi	Jumlah Desa yang Diberdaya kan Melalui Peningkata n Usaha Ekonomi Produktif	n/a des a	n/a des a	0	4 desa	17.4 12.7 00	4 desa	237. 384. 100	4 desa	280. 500. 000	4 desa	269. 500. 000	4 desa	96.0 00.0 00		900. 796. 800	Din as Lin gku nga n Hid up dan Ke hut ana n	D IY	

Kerangka	Tujan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Perubahan Renstra Peringkat Daerah		Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Kerangka
							target	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp			
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
			3.28.04.1.03	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Terlaksananya Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam yang dikelola	3	3	0	3	183.029.500	3	512.000.000	3	532.000.000	3	552.000.000	3	572.000.000	3	2.351.029.500	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIY	
			3.28.04.1.03.03	Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Lahan Basah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pemanfaatan Lahan Basah	n/a dokumen	n/a dokumen	0	3 dokumen	74.725.700	3 dokumen	150.000.000	3 dokumen	170.000.000	3 dokumen	190.000.000	3 dokumen	210.000.000	3 Dokumen	794.725.700	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIY	

Keterangan	Tujan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Perubahan Renstra Peringkat Daerah		Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
							target	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp			
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
			3.28.04.1.03.06	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola	n/a Ha	n/a Ha	0	5 Ha	108.303.800	10 Ha	362.000.000	10 Ha	362.000.000	10 Ha	362.000.000	10 Ha	362.000.000	10 Ha	1.556.300	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIY	
			3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi	n/a	n/a	401.240.000	66 indeks	402.150.400	66 indeks	1.334.200.000	67 indeks	1.344.100.000	68 indeks	1.388.400.000	69 indeks	1.272.600.000	69 indeks	6.142.690	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIY	menjadi
					Nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi	n/a	n/a		68,53		n/a		n/a		n/a		n/a		68,53				

Keterangan	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Perubahan Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Peringkat Daerah Penganggung-jawab	Lokasi	Keterangan
							target	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp			
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
			3.28.04.1.01	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	Luas hutan konservasi yang dikelola	634,10 ha	634,10 ha	401.240.000	634,10 ha	219.120.900	634,10 ha	822.200.000	634,10 ha	812.100.000	634,10 ha	836.400.000	634,10 ha	700.600.000	634,10 ha	3.791.660.900	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIY	
			3.28.04.1.01.0015	Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi	Luas Kawasan TAHURA Provinsi yang diamankan	n/a laporan	n/a laporan	401240000	1 laporan	94.058.500	1 laporan	314.769.500	634,10 ha	172.600.000	634,10 ha	189.900.000	634,10 ha	208.600.000		979.928.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIY	
			3.28.04.1.01.0013	Pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa beserta habitatnya di Tahura Provinsi	Luas kawasan TAHURA yang diinventarisasi dan Diverifikasi dengan	n/a ha	n/a ha	0	6 ha	107.649.700	6 ha	270.046.400	6 ha	359.000.000	6 ha	377.000.000	6 ha	396.000.000		1.509.696.100	Dinas Lingkungan Hidup dan	DIY	

Kerangka	Tujan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Perubahan Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Kerangka
							target	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp			
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
					nilai Kehati tinggi																Ke hut anan		
			3.28.04.1.01.08	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi	Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif	n/a desa	n/a desa	0	4 desa	17.412.700	4 desa	237.384.100	4 desa	280.500.000	4 desa	269.500.000	4 desa	96.000.000		900.796.800	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIY	

Keterangan	Tujan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Perubahan Renstra Peringkat Daerah		Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
							target	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp			
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
			3.28.04.1.03	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Terlaksananya Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam yang dikelola	3	3	0	3	183.029.500	3	512.000.000	3	532.000.000	3	552.000.000	3	572.000.000	3	2.351.029.500	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIY	
			3.28.04.1.03.03	Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Lahan Basah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pemanfaatan Lahan Basah	n/a dokumen	n/a dokumen	0	3 dokumen	74.725.700	3 dokumen	150.000.000	3 dokumen	170.000.000	3 dokumen	190.000.000	3 dokumen	210.000.000		794.725.700	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIY	

Keterangan	Tujan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Perubahan Renstra Peringkat Daerah		Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
							target	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp			
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
			3.28.04.1.03.06	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola	n/a Ha	n/a Ha	0	5 Ha	108.303.800	10 Ha	362.000.000	10 Ha	362.000.000	10 Ha	362.000.000	10 Ha	362.000.000		1.55 6.30 3.80 0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIY	
			3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase kelompok tani hutan yang meningkatkan kapasitasnya (%)	18,86 %	18,86 %	1.47 5.04 3.00 0	19,09 %	139.494.800	19,96 %	439.817.300	20,82 %	468.799.100	21,69 %	509.978.900	22,55 %	552.676.900	22,55 %	2.11 0.76 7.00 0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIY	semula
					Persentase kelompok tani hutan yang meningkatkan kapasitasnya	18,68 %	18,68 %		22,17 %		n/a		n/a		n/a		n/a		22,17 %				

Keterangan	Tujan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Perubahan Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
							target	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp			
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
			3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Terlaksananya peningkatan kapasitas kelompok tani hutan dan masyarakat	n/a	n/a	1.475.043.000	5 kelo mpo k	139.494.800	10 kelo mpo k	439.817.300	15 kelo mpo k	468.799.100	20 kelo mpo k	509.978.900	25 kelo mpo k	552.676.900	25 kelo mpo k	3.585.810.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	D	IY
			3.28.05.1.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	n/a orang	n/a orang	118.570.000	59 orang	42.881.600	57 orang	250.427.000	57 orang	260.469.700	57 orang	280.816.700	57 orang	300.598.400	57 orang	1.135.193.400	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	D	IY
			3.28.05.1.01.02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan	n/a kelompok	n/a kelompok	1.356.473.000	5 kelo mpo k	96.613.200	10 kelo mpo k	189.390.300	10 kelo mpo k	208.329.400	10 kelo mpo k	208.329.400	10 kelo mpo k	208.329.400		910.991.700	Dinas Lingkungan Hidup dan	D	IY

Keterangan	Tujan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Perubahan Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Peringkat Daerah Penganggung-jawab	Lokasi	Keterangan
							target	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp			
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
			3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Terlaksananya peningkatan kapasitas kelompok tani hutan dan masyarakat	n/a	n/a	1.475.043.000	5 kelo mpo k	139.494.800	10 kelo mpo k	439.817.300	15 kelo mpo k	468.799.100	20 kelo mpo k	509.978.900	25 kelo mpo k	552.676.900	25 kelo mpo k	2.110.767.000	Dinas Kehutanan	DIY	
			3.28.05.1.01.0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	n/a	n/a	118.570.000	59 orang	42.881.600	57 orang	250.427.000	57 orang	260.469.700	57 orang	280.816.700	57 orang	300.598.400	57 orang	841.884.800	Dinas Kehutanan	DIY	
			3.28.05.1.01.02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan	n/a	n/a	1.356.473.000	5 kelo mpo k	96.613.200	10 kelo mpo k	189.390.300	10 kelo mpo k	108.329.400	10 kelo mpo k	108.329.400	10 kelo mpo k	108.329.400	45 kelo mpo k	610.991.700	Dinas Kehutanan	DIY	

Ker era nga n	Tuj uan	Sasa ran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (<i>outcome</i>), Kegiatan (<i>output</i>), dan subkegiatan	Dat a Capa ian pada Tahu n Awal Pere ncan aan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Perubahan Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerj a Pera ngka t Daer ah Pen ang g- jawa b	L o k a si	Ket era nga n
							tar get	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		tar get	Rp			
									tar get	Rp	tar get	Rp	tar get	Rp	tar get	Rp	tar get	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
					Pendampi ngan Kelembaga an																Ke hut ana n		
			3.28. 05.1. 01.00 09	Pengemba ngan Usaha Perhutana n Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatka n Kualitasny a	n/a kel om pok	n/a kel om pok						10 unit	100. 000. 000	10 unit	100. 000. 000	10 unit	100. 000. 000	30 unit	300. 000. 000	Din as Lin gku nga n Hid up dan Ke hut ana n	D IY	
	Total							92.2 70.7 65.7 56		103. 942. 432. 564		128. 289. 418. 461		167. 417. 014. 312		140. 281. 306. 304		146. 618. 166. 852		778. 819. 104. 249			

BAB 7 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah merupakan indikator yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Sesuai dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 111 Tahun 2022 Pasal 4, tugas Dinas adalah membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan urusan pemerintahan bidang kehutanan. Merujuk pada hal tersebut, maka indikator kinerja DLHK yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD DIY ditampilkan dalam Tabel berikut ini.

Tabel 23 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal Kinerja Tujuan/Sasaran (Baseline 2022)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-					Kondisi Akhir Tahun (2027)
						Tahun ke-1 (2023)	Tahun ke-2 (2024)	Tahun ke-3 (2025)	Tahun ke-4 (2026)	Tahun ke-5 (2027)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Tercapainya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta terwujudnya pengelolaan hutan lestari	Ketercapaian kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta keterwujudan pengelolaan hutan lestari			n/a	82,35%	85,91%	92,76%	94,33%	100%	100%
			Tercapainya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU	21,43%	24,44%	25%	25,34%	25,66%	26,58%	26,58%

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal Kinerja Tujuan/Sasaran (Baseline 2022)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-					Kondisi Akhir Tahun (2027)
						Tahun ke-1 (2023)	Tahun ke-2 (2024)	Tahun ke-3 (2025)	Tahun ke-4 (2026)	Tahun ke-5 (2027)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				LH yang diterbitkan oleh Provinsi							
				Nilai indeks pencemaran sungai lintas kab/kota	6,28	6,2	6,11	6,03	5,94	5,86	5,86
			Terwujudnya pengelolaan hutan lestari	Peningkatan jumlah produksi sektor kehutanan	n/a	5%	5%	5%	5%	5%	5%
			Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Peringkat Daerah	Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	BB (80)	BB (80)	A (88,98)	A (88,99)	A (89,00)	A (89,01)	A (89,01)
			Terpapainya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Provinsi	21,43%	24,44%	25%	25,34%	25,66%	26,58%	26,58%
				Nilai indeks pencemaran sungai lintas	6,28	6,2	6,11	6,03	5,94	5,86	5,86

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal Kinerja Tujuan/Sasaran (Baseline 2022)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-					Kondisi Akhir Tahun (2027)
						Tahun ke-1 (2023)	Tahun ke-2 (2024)	Tahun ke-3 (2025)	Tahun ke-4 (2026)	Tahun ke-5 (2027)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				kab/kota							
			Terwujudnya pengelolaan hutan lestari	Persentase Luas lahan kritis yang direhabilitasi di DIY	2,31%	2,52%	3,15 %	4,61 %	4,82 %	5,87 %	5,87 %

BAB 8 PENUTUP

8.1 Catatan Penting

Rancangan Akhir Perubahan Renstra yang nantinya disempurnakan menjadi Perubahan Renstra DLHK DIY Tahun 2022-2027 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DLHK DIY selama periode 5 (lima) tahun. Perubahan Renstra DLHK DIY Tahun 2022-2027 harus dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di lingkungan DLHK DIY sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Dalam rangka menjamin keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renstra maka akan dilakukan evaluasi secara periodik. Adanya Perubahan Renstra ini juga menunjukkan bahwa dimungkinkan adanya perubahan/revisi substansi sesuai dengan mekanisme yang berlaku untuk mengakomodir dinamika yang terjadi dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah termasuk penyesuaian nomenklatur Perencanaan Pembangunan.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Sesuai dengan Surat Edaran Gubernur DIY Nomor 00.7.2/8357 tentang Penyusunan Renstra/Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022 - 2027 maka disusunlah dokumen Rancangan Akhir Perubahan Renstra yang kemudian akan disempurnakan menjadi dokumen Perubahan Renstra. DLHK DIY dalam menentukan program/kegiatan/subkegiatan pada Rancangan Akhir Perubahan Renstra mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dengan memperhatikan:

- a. Penyelarasan program prioritas nasional dalam RPJMD Tahun 2022 – 2027
- b. Evaluasi hasil capaian kinerja, tujuan, sasaran dan hasil (outcome) Perubahan Renstra DLHK DIY periode sebelumnya melalui evaluasi capaian Renja sampai dengan dengan tahun 2024

- c. Evaluasi kontribusi keluaran (output) dari seluruh kegiatan/subkegiatan sampai dengan tahun 2024 dalam pencapaian hasil (outcome)
- d. Isu – isu strategis yang terkait dengan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan
- e. Kebijakan nasional
- f. Regulasi yang berlaku
- g. Saran dan/atau masukan dari para pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan daerah

8.3 Rencana Tindak Lanjut

Rancangan Akhir Perubahan Renstra DLHK DIY Tahun 2022 – 2027 akan ditindaklanjuti dengan penetapan dokumen Perubahan Renstra DLHK DIY Tahun 2022 – 2027.

Yogyakarta, 13 Januari 2025

**Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan DIY**



Kusno Wibowo, S.T., M.Si.



DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jl. Argulobang No. 19 Yogyakarta
Telepon (0274) 588518 Faks 0274-512447
Website: <https://dlhk.jogjoaprov.go.id>
Email: dlhk@jogjaprov.go.id
Kode Pos: 55225